



**ANALISIS KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN &
PERTUMBUHAN &
EKONOMI
DI INDONESIA**

Penulis:
Khairani Alawiyah Matondang
Fitrawaty
Randeska Manulang

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2019

Daftar Isi

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

II. KERANGKA TEORI DAN BUKTI EMPIRIS MENGENAI DAMPAK KETIMPANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PENGANGGURAN

2.1 Hubungan antara Ketimpangan dan Pertumbuhan

2.2 Hubungan antara Ketimpangan dan Pengangguran

UKURAN-UKURAN KETIMPANGAN

IV. MODEL DAN DATA

V. HASIL ESTIMASI

5.1 Ketimpangan dan Pertumbuhan

5.2 Ketimpangan dan Pengangguran

VI. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Pendahuluan

Ketimpangan (*inequality*) di Indonesia kini meningkat. Hingga tahun 2007, Indonesia mengalami tingkat ketimpangan yang cukup stabil, sebagaimana terukur dengan rasio Gini berdasarkan data konsumsi rumah tangga. Pada masa itu, rasio Gini biasanya berfluktuasi antara 0,32 dan 0,36. Namun, rasio ini meningkat pesat dari 0,36 pada 2007 menjadi 0,41 pada 2011, dan ini merupakan angka tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia. Faktanya, mulai muncul kekhawatiran akan meningkatnya ketimpangan, bukan hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang dan negara-negara kekuatan ekonomi baru. Hal ini dapat dilihat pada laporan ketimpangan berjudul “Divided We Stand” yang diluncurkan OECD pada 2011, laporan “Inequality Matters” yang diluncurkan PBB pada 2013 (UN, 2013), dan berbagai laporan penelitian yang diterbitkan IMF (Berg dan Ostry, 2011; Ostry *et al.*, 2014) serta ILO (Luebker, 2012).

Meskipun demikian, masih menjadi perdebatan apakah meningkatnya ketimpangan ini merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan atau konsumsi penting untuk akumulasi aset yang nantinya akan diinvestasikan pada kemajuan teknologi yang akan dibutuhkan untuk pertumbuhan jangka panjang. Ketimpangan pendapatan juga dianggap sebagai hasil dari perbedaan “input”, yaitu investasi dalam modal manusia, terutama pendidikan, dan ketimpangan itu dianggap perlu untuk memberikan insentif pasar bagi investasi tersebut.

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan/konsumsi biasanya terkait erat dengan bentuk-bentuk ketimpangan lainnya, antara lain ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik yang secara umum termanifestasi sebagai ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*). Dimensi-dimensi lain dari ketimpangan ini dianggap

memiliki dampak yang secara signifikan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan, bahkan juga terhadap stabilitas sosial-politik. Beberapa kajian dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi berdampak buruk terhadap pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan (lihat tinjauan dalam Perrson dan Tabellini, 1994, dan Benabou, 1996).

Selain ketimpangan antar individu atau antarrumah tangga (dikenal dengan istilah ketimpangan vertikal), ketimpangan antarkelompok (dikenal dengan istilah ketimpangan horizontal) juga dianggap berdampak buruk bagi stabilitas sosial. Stewart, Brown, dan Mancini (2005) berpendapat bahwa ketimpangan horizontal sangat perlu dikaji, mengingat kesejahteraan masyarakat tidak saja dipengaruhi oleh kondisi individu mereka masing-masing, tetapi juga oleh keadaan-keadaan di dalam kelompoknya. Terkait Indonesia, studi Mancini (2005) memberikan bukti empiris bahwa ketimpangan horizontal—dalam bentuk polarisasi keagamaan—berpengaruh terhadap insiden-insiden konflik yang melibatkan kekerasan.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi agak ambigu. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi berbagai faktor, termasuk korelasi antara ketimpangan pendapatan dan dimensi-dimensi ketimpangan lainnya yang sering kali sangat dipengaruhi oleh program dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bukan saja ketimpangan pendapatan/konsumsi, tetapi juga dimensi ketimpangan lainnya, baik yang vertikal maupun horizontal.

Ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia yang memengaruhi hidup generasi masa kini maupun masa depan. Untuk mengambil tindakan yang tepat, diperlukan

pemahaman yang lebih baik mengapa ketimpangan meningkat. Bank dunia (2015) mengungkapkan bahwa ada empat masalah utama ketimpangan di Indonesia yaitu: Ketimpangan peluang; pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan dan

rendahnya ketahanan ekonomi. Meningkatnya pemahaman mengenai perubahan-perubahan dan ciri-ciri ketimpangan (bukan hanya ketimpangan pendapatan dan konsumsi, tetapi juga dimensi-dimensi ketimpangan lainnya, baik yang terkait ketimpangan vertikal maupun horizontal) dan juga dampak ketimpangan penting untuk Indonesia, terutama dalam konteks negara yang terdesentralisasi. Karena ketimpangan merupakan akibat dari–dan dipengaruhi oleh–banyak faktor, maka pemahaman umum tentang pentingnya mengatasi ketimpangan dan kebijakan apa saja yang tersedia menjadi sangat penting bagi pemerintah lokal maupun nasional serta komunitas-komunitas internasional.

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang semakin terbagi dan tidak setara dalam banyak hal. Terdapat kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara 10 persen warga terkaya dan populasi sisanya, didorong oleh banyak jenis ketimpangan di Indonesia. Masyarakat terbagi menjadi orang berpunya dan tidak berpunya bahkan sebelum dilahirkan. Hanya sebagian anak-anak terlahir sehat dan tumbuh dengan baik pada tahun-tahun pertama mereka. Demikian pula hanya sebagian anak mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas. Ini berarti sebagian besar tidak dapat memasuki lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan ekonomi modern dan dinamis. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Banyak keluarga tidak memiliki akses ke jaring pengaman sosial yang dapat melindungi mereka dari berbagai guncangan yang melanda dalam hidup. Sejumlah kecil orang Indonesia yang beruntung memiliki akses ke aset keuangan dan fisik (seperti tanah dan properti) yang membuat kekayaan mereka meningkat seiring waktu. Kekayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk uang maupun aset fisik, dan melalui akses lebih besar pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Alhasil, ketimpangan semakin berlipat ganda dan semakin lebar seiring berjalannya waktu.

Dengan memerhatikan hal tersebut di atas, maka buku ini ditujukan untuk menginvestigasi secara empiris determinasi berbagai bentuk ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengingat meningkatnya ketimpangan merupakan fenomena yang baru-baru ini saja muncul di Indonesia, hanya ada data deret waktu yang pendek pada tingkat nasional. Oleh karena itu, kajian ini menganalisis data komprehensif di tingkat kabupaten dari 2010 sampai 2017. Temuan-temuan pada kajian ini akan memperkaya bukti-bukti yang dibutuhkan untuk memahami kompleksitas ketimpangan di Indonesia.

Kajian ini penting dan relevan karena dua hal. Pertama, meskipun ada kekhawatiran yang meningkat mengenai munculnya ketimpangan di Indonesia dan di seluruh dunia, bukti empiris mengenai dampak ketimpangan terhadap keluaran-keluaran sosial-ekonomi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya masih kurang. Kedua, konteks Indonesia memberikan latar belakang yang cukup kaya data untuk membahas isu-isu empiris yang menyulitkan kajian-kajian sebelumnya karena kajian-kajian tersebut masih terbatas pada analisis lintas negara.

2. Kebijakan Mengurangi Kemiskinan

Menurunkan angka kemiskinan telah menjadi tujuan utama dari kebijakan publik di hampir semua negara termasuk negara industri (Moller et al, 2003).

Pengurangan kemiskinan akan berbeda di setiap negara, tergantung dari beberapa hal, seperti konsep kemiskinan yang dianut, karakteristik kemiskinan yang dialami, kondisi demografi, kondisi geografi, serta kemampuan ekonomi dan arah kebijakan dari negara tersebut.

Berikut ini akan kita bahas mengenai kebijakan pengurangan kemiskinan secara teori, selanjutnya akan dibahas pula kebijakan dan program pengurangan kemiskinan di Indonesia, baik dari sudut pandang para peneliti, maupun konsep, serta apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Penggunaan kata “pengurangan” atau “penanggulangan” mungkin lebih tepat daripada kata “pengentasan”, karena konsep dan ukuran kemiskinan itu akan selalu berubah seiring berubahnya waktu sehingga selalu saja ada masyarakat yang “miskin”. Ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, maka ukuran kemiskinan itupun akan meningkat, bahkan konsep dari apa yang dikatakan miskin itu sendiri dapat berubah seperti dijelaskan pada bab-bab sebelum ini.

2.1. Kebijakan Fiskal

Suatu kebijakan yang sangat terkait dengan distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah kebijakan fiskal. Wujud dari kebijakan ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pengeluaran negara dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen penting kebijakan pemerintah, tidak boleh hanya difahami sekadar sebagai suatu dokumen keuangan

semata, melainkan juga harus dipahami sebagai dokumen politik. Ini terjadi karena dalam perumusan dan penetapan isinya mengandung banyak aspek yang berkaitan dengan proses dan kompromi kepentingan politik. Selain itu, dokumen APBN itu juga merefleksikan komitmen politik dan prioritas kebijakan sosial ekonomi pemerintah.

Di samping itu, anggaran publik yang menegaskan prinsip *pro-poor* juga memiliki landasan konstitusional yang kuat. Landasan filosofi keuangan publik yang dianut oleh Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dan bukan hanya perwujudan pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, pengalokasian anggaran harus didasarkan pada aspek keberpihakan, yaitu keberpihakan pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Jika proses penganggaran negara dan daerah bervisi *pro-poor*, maka anggaran publik yang berpihak pada kaum miskin (*pro-poor budget*) menjadi instrumen politik terpenting dalam pengurangan kemiskinan. Di sinilah politik anggaran menempati posisi penting dalam mensejahterakan rakyat.

Menyadari hal ini, seyogyanya kebijakan anggaran jangan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, sesungguhnya merupakan masalah. Pemerintah harus menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak semata tinggi, tetapi juga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin (*pro-poor growth*). Kebijakan dan program pembangunan ekonomi seharusnya dititikberatkan kepada sektor ekonomi riil yang secara langsung maupun tidak langsung menyentuh kehidupan mayoritas kaum miskin, seperti pertanian, perikanan, usaha kecil menengah, dan sektor informal.

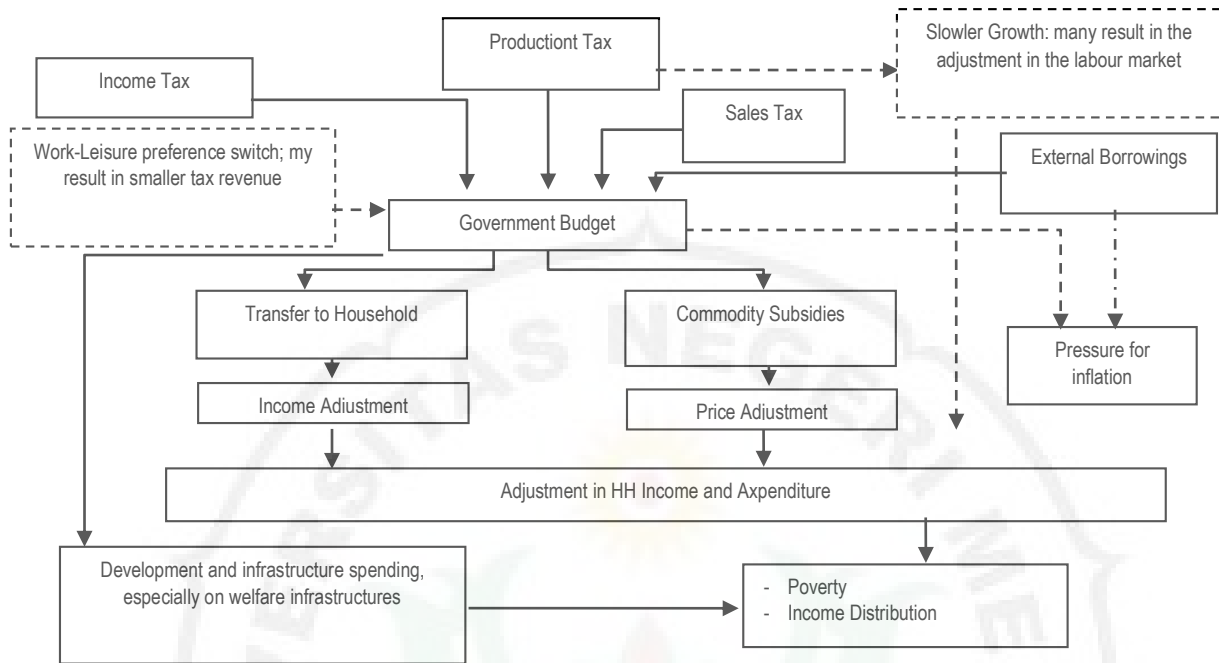
Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981).

Lebih jauh Soediyono (1985) mengatakan bahwa variabel instrumen dari kebijakan fiskal dapat berupa pajak (*tax*), transfer pemerintah (*government transfer*), subsidi (*subsidies*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran (*budgetary policy*) yang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan fiskal **atau anggaran memiliki tiga fungsi** yaitu, (1) fungsi alokasi (*allocation function*), (2) fungsi distribusi (*distribution function*), dan (3) fungsi stabilisasi (*stabilization function*). Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang sosial (*social goods*) atau proses penggunaan sumberdaya keseluruhan **yang dibagi diantara barang privat** (*private goods*), barang sosial (*social goods*) dan kombinasi barang sosial yang dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata di masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi sesuai dengan namanya bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas tingkat harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai.

2.2. Peranan Kebijakan Fiskal dalam Menurunkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan persoalan yang krusial bagi setiap negara, sehingga pemerintah di masing-masing negara berusaha untuk mengurangi persoalan tersebut melalui instrumen fiskal. Skema instrumen fiskal yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah ditampilkan pada Gambar 9.1.



Gambar 2.1. Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal dalam Mempengaruhi Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan (Sumber: Damuri dan Perdana, 2003)

Dari sisi penerimaan, anggaran pemerintah untuk pembiayaan publik dapat dihasilkan dari dua sumber, yaitu domestik dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dalam negeri, dapat diperoleh dari pajak pendapatan, pajak penjualan dan pajak produksi, sedangkan dari luar negeri, pinjaman dapat dari berbagai bentuk seperti pinjaman luar negeri untuk publik.

Dari sisi pengeluaran, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan diimplementasikan melalui tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah, (2) subsidi harga, subsidi yang dialokasikan untuk komoditi yang digunakan oleh rumah tangga menjadi lebih murah terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, yang diutamakan bagi kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah.

Penerimaan pemerintah berasal dari pajak, non pajak, dan hibah. Pajak meliputi pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak pusat terdiri dari: (1) pajak penghasilan (PPh), (2) pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn), (3) pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), (4) pajak bumi dan bangunan (PBB), (5) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),

(6) bea meterai, (7) cukai, (8) pajak/pungutan ekspor, dan (9) bea masuk, dan lainnya (Hutahaean, et al., 2002).

Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) mempunyai efek (transmisi) yang relatif cepat terhadap perubahan perilaku menabung, investasi dan ekspansi usaha perusahaan (James dan Nobes, 1992). Dalam kasus Indonesia PPh dan PPn sensitif terhadap perubahan perilaku rumahtangga dan perusahaan. Dari sisi pajak, intervensi pemerintah untuk mempengaruhi kinerja sektoral akan efektif dengan instrumen PPh dan PPn (Darsono, 2008).

Analisis yang mengkombinasikan sistem pajak pendapatan (PPh) dengan pajak pertambahan nilai (PPn), ditemukan dalam Atkinson dan Stiglitz (1976), Mirrlees (1976), dan Myles (1997). Dalam model ini diasumsikan bahwa terdapat n barang yang disediakan oleh produsen sebagai barang 1 dengan tingkat upah w . Seperti aturan normalisasi, pajak bersifat linear terhadap n barang. Dengan aturan ini keterbatasan anggaran (qx) yang dihadapi seorang konsumen dengan kemampuan membayar pajak s dan tingkat pajak T berbentuk:

$$\sum_{i=2}^n q_i x_i = swx_1 - T(sw x_1) \quad (2.1)$$

Untuk penyederhanaan derivasi, teknologi produksi dianggap linear sehingga kemungkinan produksi dibatasi oleh hubungan:

$$\sum_{i=2}^n \int_0^{\infty} x_i(s) \gamma(s) ds \leq \int_0^{\infty} swx_1(s) \gamma(s) ds - z^G \quad (2.2)$$

dimana, z^G : pengenaan pajak pemerintah. Dengan teknologi linear memungkinkan untuk mengambil harga produsen dari setiap barang 2,... ..n menjadi 1.

Pajak optimal dapat diperoleh dengan memperlakukan $U(s)$ sebagai variabel riil dan $x_i(s)$, $i = 1, \dots, n-1$ sebagai variabel kontrol. $x_n(s)$ ditentukan dari identitas $U(s) = U(x_1(s), \dots, x_n(st))$. Persyaratan orde pertama untuk *self selection* diturunkan dengan menggunakan fakta bahwa

$u_s = -\frac{U_1^2}{s^2} = \frac{U_1 l}{s}$ atau dalam notasi $u_s = -\frac{U_{x_1} x_1}{s}$. Pendekatan orde pertama Hamiltonian untuk

maksimisasi dapat ditulis dengan menggunakan persamaan (9.2) sebagai berikut.

$$H = \left[U + \lambda \left[swx_1 - \sum_{i=2}^n x_i \right] \right] \gamma(s) - \mu \frac{x_1 U_{x_1}}{s} \quad (2.3)$$

Untuk memilih $x_k(s)$, $k = 2, \dots, n-1$, digunakan fakta bahwa:

$$\frac{\partial x_n}{\partial x_k} = -\frac{U_{x_k}}{U_{x_n}} \quad (2.4)$$

Syarat perlu untuk optimalitas adalah:

$$-\lambda \left[1 - \frac{U_{x_k}}{U_{x_n}} \right] \gamma - \frac{\mu x_1}{s} \left[U_{x_1 x_k} - U_{x_1 x_n} \frac{U_{x_k}}{U_{x_n}} \right] = 0, k = 2, \dots, n \quad (2.5)$$

Dari syarat perlu tersebut maksimisasi utilitas rumahtangga diperoleh sebagai berikut.

$$\frac{U_{x_k}}{U_{x_n}} = \frac{1 + t_k}{1} \quad (2.6)$$

Dengan mensubsitinsi (9.6) ke (9.5), dan menyusun ulangnya, maka pajak optimal (t_k) dapat ditulis menjadi:

$$t_k = \frac{\mu x_1 U_{x_k}}{\lambda \gamma s} \left[\frac{d \log \left[\frac{U_{x_k}}{U_{x_n}} \right]}{dx_1} \right], k = 2, \dots, n-1 \quad (2.7)$$

2.3. Subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah output (Spencer & Amos, 1993).

Subsidi atau transfer merupakan suatu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan bagi penerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).

Subsidi dalam bentuk uang dapat diberikan pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen agar dapat menurunkan harga barang yang diproduksinya.

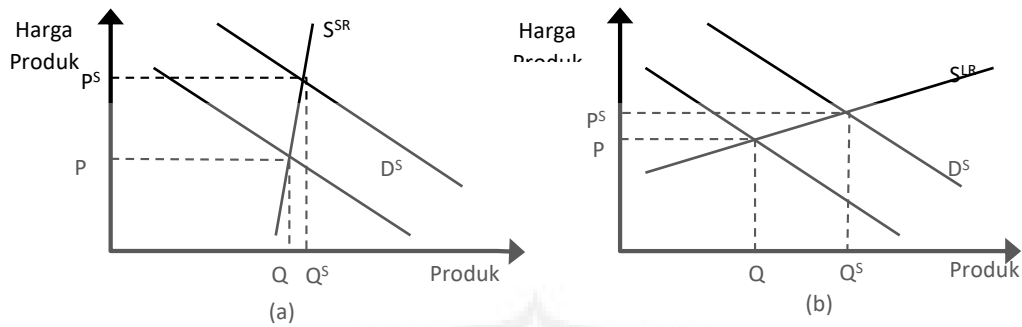
Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar (Handoko dan Patriadi, 2005).

Subsidi dalam belanja negara dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya produk kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga. Dengan subsidi diharapkan bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang mencukupi dengan harga yang stabil serta terjangkau oleh daya beli masyarakat (Nota Keuangan dan APBN, 2009).

Di negara berkembang, subsidi penting sebagai instrumen fiskal untuk mendorong produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Subsidi merupakan bentuk transfer pemerintah yang efisien sekaligus sebagai alat redistribusi kesejahteraan antar penduduk dan antar produsen dengan konsumen. Inilah pokok pentingnya subsidi, sehingga pada perekonomian majupun masih menggunakan instrumen subsidi dari pemerintah ke sektor swasta.

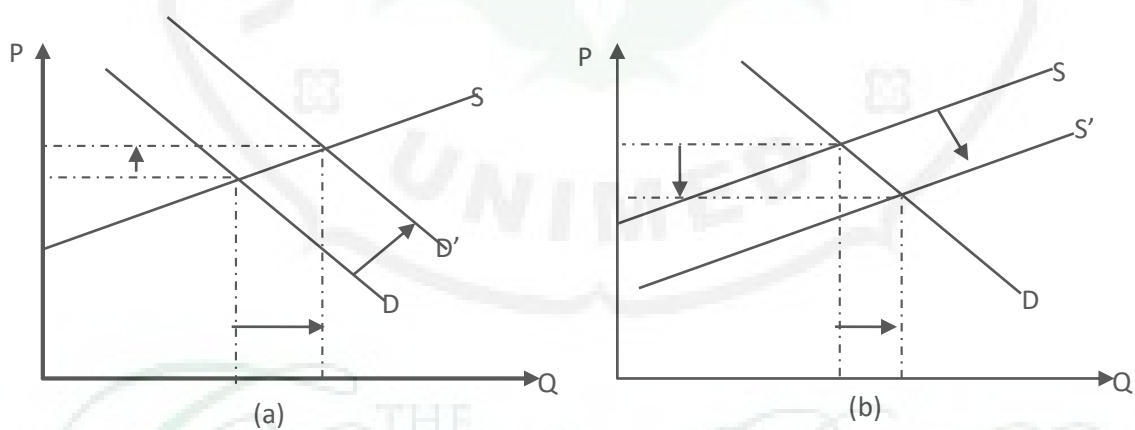
Dampak dari subsidi pemerintah khususnya untuk produk pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.2. Kurva penawaran produk pertanian dalam jangka pendek (SR) (Gambar 2.2(a)) diasumsikan sangat tidak elastis karena untuk menghasilkan produk pertanian membutuhkan waktu yang panjang bahkan musiman.

Jika pemerintah membayar agregat subsidi untuk produk pertanian, maka akan berdampak terhadap peningkatan permintaan produk pertanian (kurva permintaan bergeser ke kanan atas). Harga produk pertanian akan naik, walau kenyataannya petani hampir tidak bisa meningkatkan produksinya.



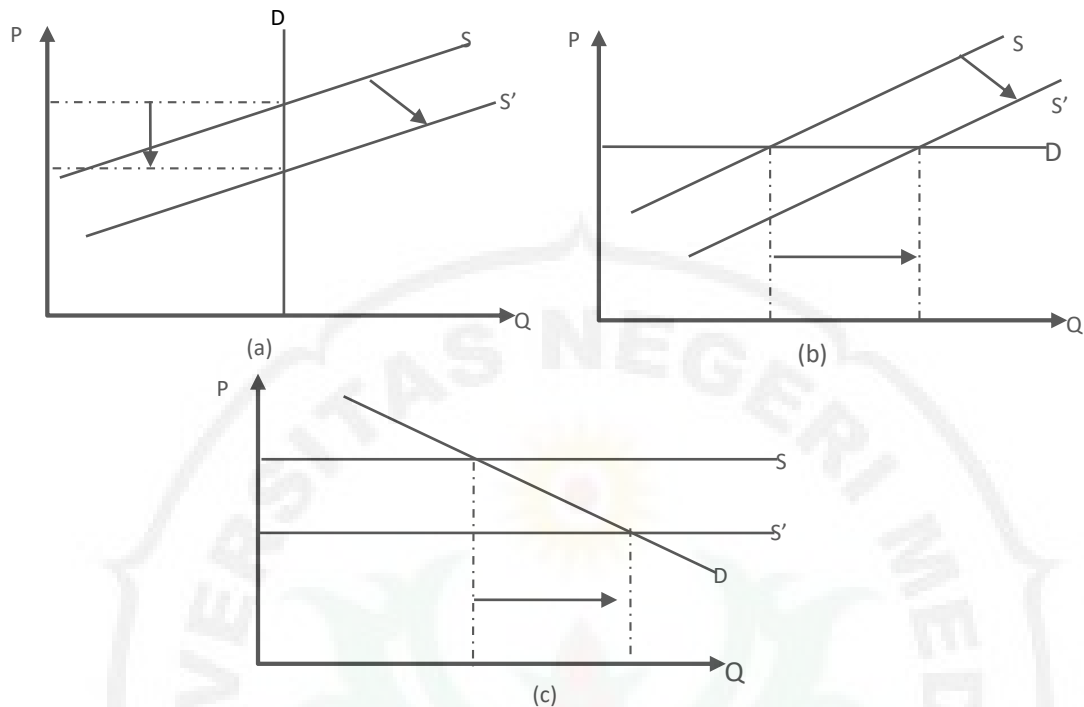
Gambar 2.2. Dampak Subsidi terhadap Peningkatan Produksi Pertanian (Sumber: Stiglitz, 2000)

Subsidi akan menggeser kurva permintaan ke atas (ke kanan) untuk konsumsi bersubsidi (*subsidized consumption*) atau kurva penawaran ke bawah (ke kanan) untuk produksi bersubsidi (*subsidized production*). Hasil dari kedua jenis subsidi ini adalah ekuilibrium kuantitas baru yang lebih besar. Pengaruh kedua jenis subsidi ini pada kurva permintaan dan penawaran dapat dilihat pada Gambar 2.3. Pada Gambar 2.3 (a) konsumsi bersubsidi akan menggeser kurva permintaan D ke atas menjadi kurva permintaan D' . Sedangkan pada Gambar 2.3 (b), produksi bersubsidi akan menggeser kurva penawaran S ke bawah menjadi kurva penawaran S' .



Gambar 2.3. Dampak Subsidi Terhadap Permintaan dan Penawaran

Pengaruh elastisitas kurva permintaan dan penawaran disajikan pada Gambar 2.4. Pada kondisi *perfectly inelastic demand* (Gambar 2.4 (a)), subsidi akan menggeser kurva penawaran dari S ke S' . Ini akan membuat harga menjadi lebih rendah dari sebelum subsidi dengan jumlah permintaan yang tetap. Sebaliknya pada kondisi *perfectly elastic demand* (Gambar 2.4(b)), adanya subsidi akan menambah jumlah permintaan dengan harga yang tetap. Ini akan sama halnya dengan kondisi *perfectly elastic supply* (Gambar 2.4(c)).



Gambar 2.4. Dampak Subsidi pada Kondisi *Perfect* dan *Inperfect Elasticity*

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan dengan barang dan jasa yang memiliki eksternaliti yang positif dengan tujuan untuk menambah output dan hal ini merupakan efek positif dari subsidi. Sedangkan efek negatif dari subsidi bahwa subsidi dapat menciptakan alokasi yang tidak efisien karena konsumen membayar harga yang lebih rendah dari harga pasar sehingga ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi.

Selain itu, karena harga lebih rendah dari *opportunity cost*, maka dapat terjadi pemborosan dalam penggunaan sumberdaya untuk memproduksi barang yang disubsidi (Spencer & Amos, 1993). Subsidi yang tidak transparan dan tidak *well-targeted* dapat menyebabkan distorsi harga, inefisiensi dan tidak dinikmati oleh orang yang berhak (Basri, 2002).

2.4. Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

Usaha pengurangan kemiskinan di Indonesia telah dimulai sejak lama dan terus dilakukan. Sejak Repelita I tahun 1969/1970, kebijakan pembangunan ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan guna mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Secara politis, masalah kemiskinan di Indonesia mendapat perhatian yang serius sejak tahun 1993, ketika presiden Suharto menyinggung kemiskinan dalam pidatonya di Dewan Perwakilan Rakyat. Perhatian ini disusul

dengan terbitnya Instruksi presiden (inpres) Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Setahun kemudian, yaitu tahun 1994, pemerintah memperkenalkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Untuk menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, melalui program IDT disediakan dana hibah bergulir kepada penduduk miskin dan disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat yang dibentuk oleh penduduk miskin di desa tertinggal.

Besaran hibah per desa berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 60 juta tergantung jumlah penduduk. Desa dengan penduduk kurang dari 50 keluarga mendapat hibah Rp 20 juta yang diberikan pada satu tahun anggaran. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 50 keluarga namun kurang dari 100 keluarga mendapat hibah sebesar Rp 40 juta yang diberikan dalam 2 tahun anggaran. Sedangkan desa yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 100 keluarga menerima hibah Rp 60 juta dan diberikan dalam 3 tahun anggaran. Di sisi lain, program pengurangan kemiskinan juga dibarengi dengan program pengurangan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

Sebagai kelanjutan penyempurnaan dan pendukung program IDT, sejak tahun anggaran 1999/2000 telah diintegrasikan dalam satu kesatuan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi khusus yaitu Perluasan Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (JPS-PM) sebagai upaya peningkatan dan penyempurnaan dari program IDT serta program sektoral dan regional yang mendukung pengurangan kemiskinan. Dalam JPS-PM terdapat berbagai program seperti, Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Takesra/Kukesra, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Dana Bantuan Operasional Pemeliharaan SD/MI, Bantuan Beasiswa Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Pemeliharaan Puskesmas.

Upaya penanggulangan kemiskinan tentu tidak dapat dilakukan hanya menggunakan pendekatan sektoral semata, tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Apalagi permasalahan kemiskinan di Indonesia relatif kompleks, seperti disampaikan oleh Bank Dunia (2006), bahwa ada tiga ciri kemiskinan yang terdapat di Indonesia, yaitu:

- (a) banyak rumahtangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, sehingga banyak penduduk yang tergolong tidak miskin namun rentan terhadap kemiskinan.
- (b) ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Dari sisi pendapatan, banyak masyarakat yang tidak tergolong

miskin, namun miskin dari sisi akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, dan kesehatan.

(c) sangat beragamnya perbedaan antar daerah, hal ini disebabkan luasnya wilayah Indonesia. Oleh karena itu, usaha pengurangan kemiskinan perlu memperhatikan ketiga ciri tersebut.

Satu dari beberapa permasalahan kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia selama ini adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Program pengurangan kemiskinan sering dilakukan secara parsial oleh satu atau beberapa lembaga tanpa didasari oleh koordinasi yang baik. Akibatnya sering program yang diluncurkan kurang tepat sasaran, kurang terarah dan terkontrol bahkan dapat menimbulkan program tumpang-tindih atau menciut ketika sampai di bawah.

Oleh karena itu, pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sejak saat itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dirumuskan oleh pemerintah dalam empat arah kebijakan, yaitu: (1) meningkatkan program perlindungan sosial, (2) meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, (3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan (4) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Sebagai jabaran dari empat arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan empat strategi pengurangan kemiskinan, yaitu: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan (4) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Empat strategi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam membentuk program penanggulangan kemiskinan yang dibagi ke dalam empat kluster seperti diperlihatkan pada Gambar 2.5.

Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan program bantuan tunai bersyarat atau pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan persyaratan tertentu (*conditional cash transfer*). Tujuan dari PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan pada masyarakat yang paling miskin, dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengubah perilakunya.



Gambar 2.5. Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan (Sumber: disarikan dari TNP2K, 2012)

Secara khusus, PKH bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan peserta, meningkatkan taraf pendidikan, dan meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah dari keluarga peserta. Besaran dana PKH diperlihatkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jenis dan Besaran bantuan pada Program Keluarga Harapan

Jenis Bantuan	Nilai Bantuan/Tahun
1. Bantuan Tetap	Rp 200.000
2. Bantuan bagi KSM yang memiliki:	Rp 800.000
a. Ibu Hamil/menyusui, atau	
b. Anak usia di bawah 5-7 tahun, atau	
c. Anak usia prasekolah	
3. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp 400.000
4. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	Rp 800.000
Bantuan minimum per keluarga	Rp 600.000
Bantuan maksimum per keluarga	Rp 2.200.000

(Sumber: TNP2K, 2012)

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), merupakan program pemberian bantuan pendanaan untuk biaya nonpersonalia sekolah. Program ini ditujukan kepada sekolah dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Besarnya dana BOS tergantung pada jumlah siswa sekolah penerima dana BOS. Pada tahun 2012, besarnya satuan dana BOS untuk jenjang SD/SDLB adalah Rp 580.000/siswa/tahun, sedangkan untuk jenjang SMP/SMP:B/SMPT sebesar Rp 710.000/siswa/tahun.

Program bantuan Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), merupakan program pengurangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan berupa bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumahtangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada tahun 2012, pemerintah menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta rumahtangga sasaran, dan tahun 2013 direncanakan sebanyak 15,5 juta rumahtangga sasaran (TNP2k, 2012).

Program Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), merupakan program bantuan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Mereka diberikan kartu yang dapat digunakan untuk berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit yang dirujuk oleh pemerintah untuk jenis pelayanan tertentu.

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada siswa miskin (bukan karena prestasi). Tujuannya adalah untuk membantu siswa miskin agar tetap mampu bersekolah. BSM diberikan kepada siswa mulai tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Besaran dana yang diberikan diperlihatkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Penerima dan Besaran BSM

No	Jenjang Penerima	Beasar bantuan/siswa/tahun
1.	SD/MI	Rp 360.000
2.	SMP/MTs	Rp 550.000
3.	SMA/SMK/MI	Rp 780.000
4.	Perguruan Tinggi	Rp 1.200.000

Sumber: TNP2K, 2012

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), merupakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintah daerah, dan menciptakan aset untuk kelompok miskin.

PNPM Mandiri merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati oleh masyarakat, meliputi, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, kegiatan peningkatan sumberdaya manusia yang bertujuan untuk percepatan pencapaian MGDs, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan, dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bertujuan untuk mempercepat pengembangan kegiatan di sektor riil dalam rangka pengurangan angka kemiskinan. KUR diberikan kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) yang bergerak pada bidang usaha produktif, dimana usahanya dianggap layak untuk dikembangkan namun karena sesuatu hal tidak dapat menjangkau akses perbankan. Kredit yang diberikan relatif kecil, yaitu kurang dari 5 juta rupiah.

Sejak tahun 2012, pemerintah meluncurkan program pengurangan kemiskinan untuk kluster IV, yaitu program rumah sangat murah, program listrik murah dan hemat, program air bersih, program transportasi murah, dan program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Mengingat bahwa program ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tidak miskin, maka sangat rawan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pelaksanaan yang tepat, serta evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah agar program-program tersebut benar-benar tepat sasaran. Sebagai contoh, berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa tidak semua program rumah murah yang diluncurkan benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin. Tentu saja kita tidak ingin program yang direncanakan sebesar kerbau, lalu menciut di tengah jalan dan sampai di masyarakat sasaran sebesar telur ayam.

2.5. Rencana Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa pembangunan ekonomi akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Namun pembangunan ekonomi yang hanya *pro growth* dikhawatirkan tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cepat, bahkan dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan di antara masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan bukan hanya *pro growth*, tetapi juga harus *pro poor*, *pro job*, serta *pro environment*.

Pada 27 Mei 2011, Indonesia meluncurkan suatu skenario pembangunan ekonomi yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Skenario ini merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

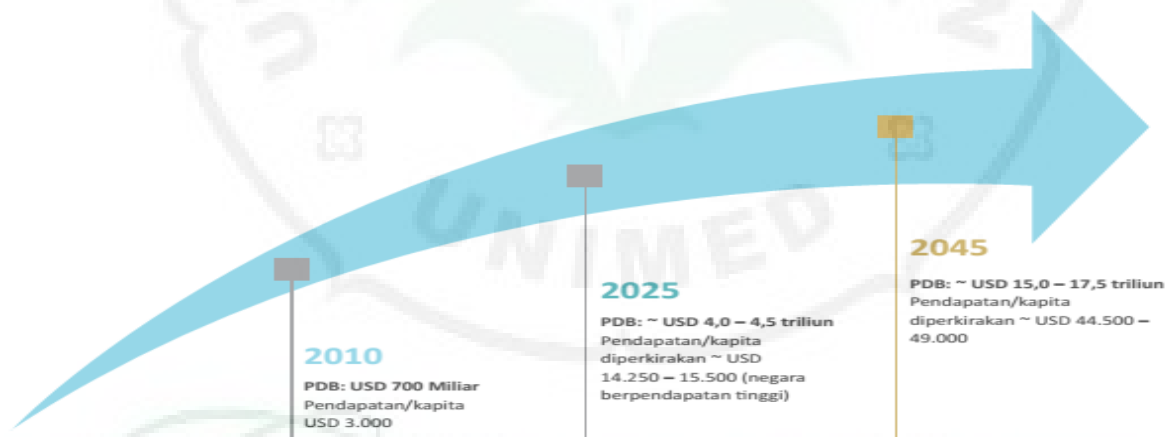
Ditopang oleh tiga strategi utama yaitu: (1) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi (koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku); (2) penguatan

konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; (3) penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional.

Pengembangan MP3EI fokus pada delapan program utama (pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis) dengan 22 kegiatan ekonomi utama. Dalam penyusunan program, digunakan strategi berbasis pada konsep pemerataan dan keadilan yang disebut *triple track + 1 strategy*, yaitu perluasan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), perluasan kesempatan kerja (*pro job*), dan penurunan tingkat kemiskinan (*pro poor*) plus tetap menjaga kelestarian lingkungan (*pro environment/green economy*).

MP3EI diyakini akan mampu membawa Indonesia mencapai visi “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

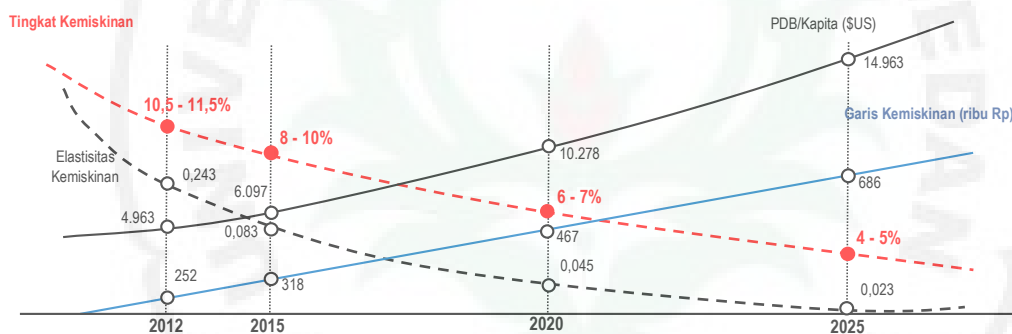
MP3EI menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan PDB berkisar antara USD 4,0 hingga 4,5 triliun, dengan tingkat pendapatan per kapita berkisar antara USD 14.250 hingga 15.000. Lebih jelasnya target capaian tersebut diperlihatkan pada Gambar 9.6.



Gambar 2.6. Target Pencapaian PDB Indonesia Menurut MP3EI (Sumber: MP3EI, 2011).

Meski demikian, MP3EI tidak secara eksplisit merencanakan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang lebih fokus dalam pengurangan kemiskinan sebagai pendamping yang bersinergi dengan MP3EI. Untuk keperluan ini, pada tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Negara Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, membentuk tim penyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

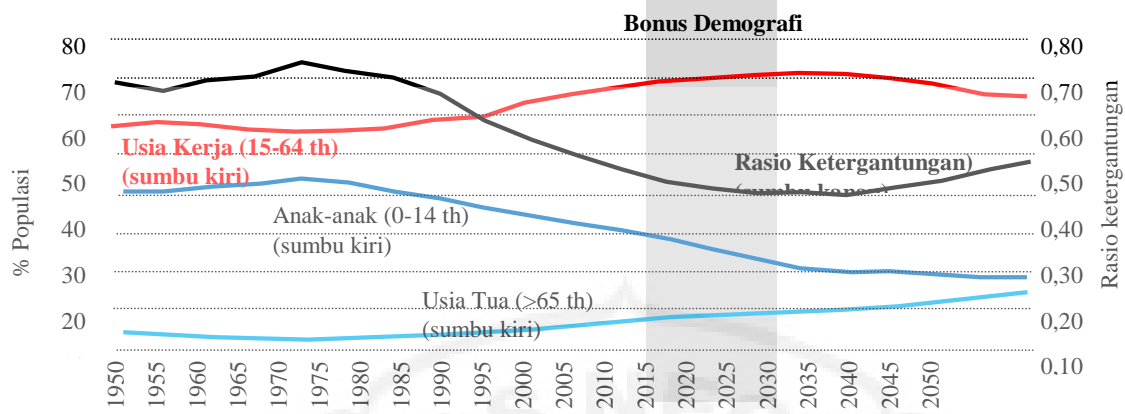
MP3KI merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan (Kementerian Perencanaan Pembangunan, 2012). MP3KI diyakini berperan dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam mengakomodir keterlibatan masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi. MP3KI menjabarkan secara khusus konsep dan desain, arah kebijakan, serta strategi pengurangan kemiskinan jangka panjang (tahun 2012-2025). Strategi jangka panjang ini dibagi ke dalam tiga periode, yaitu tahap rekonsiliasi (2012-2014), tahap transformasi dan perluasan (2015-2019), dan tahap keberlanjutan (2020-2025). Target penurunan kemiskinan dan garis kemiskinan dalam MP3KI disinergikan dengan target MP3EI seperti diperlihatkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Target Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (Sumber: Prawiradinata, 2012)

Seiring dengan meningkatnya PDB per kapita, tingkat kemiskinan diharapkan juga akan menurun hingga mencapai 4 - 5 persen pada tahun 2025, dengan garis kemiskinan sebesar RP686.000.

Dari sisi sumberdaya manusia, saat ini Indonesia sedang berada pada kondisi yang disebut dengan “bonus demografi”. Rasio tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) yang relatif kecil. Artinya pada saat ini hingga beberapa dasawarsa ke depan (lihat Gambar 2.8), Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang cukup besar dibanding dengan anak-anak dan usia tua. Di satu sisi, kondisi ini menjadi peluang sebagai input dalam pertumbuhan bila dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain kondisi ini dapat menjadi penghambat yang beruntun dalam pembangunan ekonomi.



Gambar 2.8. Kondisi Demografi Indonesia (Sumber MP3EI, 2011)

Mengapa penghambat yang beruntun, karena bila pada masa usia kerja mereka tidak dapat bekerja secara optimal, misalnya karena ketidakcukupan lapangan kerja, produktivitas yang rendah, gaji yang rendah dan lainnya, maka sumberdaya manusia yang melimpah tersebut akan menjadi masalah. Ketika mereka melewati usia kerja, mereka akan menjadi masalah lagi karena akan menjadi beban bagi yang bekerja, dan pada saat itu jumlah masyarakat usia kerja lebih kecil dari jumlah yang telah melewati usia kerja. Kondisi ini dapat memicu perangkap demografi

Mampukah Indonesia mencapai target MP3EI? Pertanyaan tersebut tidak dibahas pada buku ini. Namun Indonesia harus bekerja keras dan harus punya “nasionalisme” yang tinggi bila ingin mencapainya. Satu dari beberapa akar masalah bangsa ini adalah rasa nasionalisme yang kurang memadai. Sebagai catatan, bahwa sejarah perkembangan jangka panjang perekonomian Indonesia sangat berfluktuasi, tidak cukup menggembirakan dan sulit untuk diprediksi.

Studi yang dilakukan Van Zanden dan Marks (2012) tentang perekonomian dari tahun 1800 hingga 2010, menemukan bahwa satu dari beberapa penyebab rendahnya rata-rata peningkatan kesejahteraan di Indonesia di banding dengan negara lain, adalah faktor produktivitas yang rendah. Kurun waktu 200 tahun (1815-2000), angka rata-rata pertumbuhan total faktor produktivitas Indonesia hanya sebesar 0,22 persen dan dengan gamblang dikatakan bahwa kurun waktu tersebut, “lebih banyak peluh daripada inspirasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia” (Van Zanden dan Marks, 2012:34). Proksi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia hasil kajian tersebut diperlihatkan pada Tabel 9.3.

Tabel 2.3. Proksi Sumber Pertumbuhan: Kontribusi Modal Fisik, Tenaga kerja, dan Pertumbuhan Total Faktor Produktivitas Terhadap Pertumbuhan Output Indonesia.

Tahun	Output	Kontribusi Dari (dalam persen)		
		Modal Fisik	Tenaga Kerja	Faktor Produktivitas
1815 – 1860	1,7	1,0	1,1	-0,4
1860 – 1914	2,4	1,0	0,9	0,5
1914 – 1939	2,1	1,6	0,8	-0,3
1950 – 1966	3,0	0,5	1,4	1,1
1967 – 1997	6,9	3,1	2,5	1,2
1815 – 2000	2,6	1,2	1,2	0,2
1815 – 1900	1,9	0,9	1,0	0,0
1900 – 2000	3,1	1,7	1,5	0,0

Sumber: Van Zanden dan Marks (2012)

2.6. Beberapa Kajian Pengurangan Kemiskinan

Kajian Bank Dunia (2006), merumuskan empat dimensi penting dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia, yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dari sisi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, (2) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, (3) mengurangi tingkat kerentanan bagi masyarakat miskin, dan (4) memperkuat kerangka kelembagaan untuk dapat membuat kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin.

Lebih spesifik, Bank Dunia dalam kajiannya merekomendasikan 16 tindakan prioritas yang harus dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan, yaitu: (1) menghapuskan larangan impor beras guna menurunkan dan menciptakan stabilitas harga beras, (2) investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perluasan akses dan keterjangkauan serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, (3) investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perluasan dan perbaikan akses, (4) mengurangi angka kematian ibu, (5) memperbaiki kualitas air dan memperluas akses masyarakat terhadap air bersih, (6) menangani krisis sanitasi, (7) meluncurkan program pembangunan jalan di pedesaan, (8) memperluas pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, (9) pengembangan sistem jaminan sosial yang komprehensif yang mampu menangani resiko masyarakat miskin dan yang rentan terhadap kemiskinan, (10) revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan, (11) memperlancar sertifikasi tanah dan pemanfaatan lahan untuk penggunaan yang produktif, (12) menciptakan aturan tenaga kerja yang lebih fleksibel, (13) memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin, (14) meningkatkan perencanaan dan penganggaran untuk masyarakat miskin, (15) meningkatkan kapasitas pemerintah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pengurangan kemiskinan, dan (16) memperkuat monitoring dan kajian terhadap kemiskinan.

Rekomendasi dari kajian Bank Dunia tersebut, tentu perlu menjadi pertimbangan dan penyesuaian dengan kondisi Indonesia. Misalnya rekomendasi penghapusan larangan impor beras tidak serta merta harus diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi para petani dalam negeri.

Bila larangan impor beras dihapuskan, mungkin harga beras akan lebih murah dan kompetitif, namun bagaimana dengan petani dalam negeri, apakah mereka sanggup berkompetisi? Bagaimana bila jawabannya tidak sanggup? Tentu memerlukan kajian dan pertimbangan yang mendalam. Terlepas dari hal seperti itu, secara umum rekomendasi tersebut nampaknya selaras dengan program pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah seperti di bahas pada bahagian 9.4 dan 9.5.

Mengingat sebahagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan, meskipun dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah terjadi urbanisasi yang sangat pesat, maka pengurangan kemiskinan masih perlu memperhatikan sektor pertanian.

Studi Simatupang (2000) memperlihatkan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat esensial dalam konteks pembangunan ekonomi yang handal. Dia menyatakan ada empat karakteristik untuk menunjukkan hal tersebut. Pertama, sektor pertanian merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar dan penghasil pangan yang merupakan kebutuhan dasar penduduk. Dalam hal ini sektor pertanian sangat berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sebagian besar penduduk dan pengurangan kemiskinan sebagai tujuan pembangunan. Dengan demikian dalam memacu pembangunan, pengembangan pertanian merupakan strategi yang efektif sehingga harus dijadikan prioritas.

Kedua, usaha pertanian berbasis pada sumberdaya domestik dan permintaan terhadap produknya tidak elastis terhadap pendapatan maupun harga, sehingga tangguh menghadapi gejolak ekonomi. Sehubungan dengan itu, sektor pertanian merupakan andalan yang tepat dalam rangka kemandirian dan ketahanan ekonomi yang esensial agar pembangunan dapat berkelanjutan dalam era globalisasi.

Ketiga, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sangat fleksibel, sehingga sektor pertanian dapat berfungsi sebagai jaring pengaman (*survival sector*) dalam keadaan darurat. Adanya sistem pengaman dalam menghadapi resiko (*risk coping mechanism*) sangat esensial dalam tatanan perekonomian persaingan bebas yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian.

Keempat, produksi relatif stabil, memiliki keterkaitan antar sektoral yang luas dan sangat penting untuk pemantapan ketahanan pangan, pengendalian inflasi dan peningkatan penerimaan devisa, sehingga peningkatan pembangunan pertanian merupakan kunci bagi pemulihan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, sektor pertanian patut

dipertimbangkan sebagai alternatif andalan pembangunan ekonomi menggantikan sektor industri yang telah terbukti tidak sesuai untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa negara sedang berkembang yang dilakukan Gemmill (1994), menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena: (1) sektor pertanian dapat menjaga tingkat inflasi dan biaya upah yang tetap rendah dalam perekonomian, (2) sektor pertanian menyediakan pasokan bahan mentah bagi sektor-sektor industri berbasis pertanian, (3) sektor pertanian menyediakan tenaga kerja bagi pertumbuhan sektor perekonomian non-pertanian melalui transfer tenaga kerja, (4) sektor pertanian meningkatkan laju pemupukan modal, (5) sektor pertanian membantu perbaikan neraca pembayaran, dan (6) sektor pertanian memperluas pasar dalam negeri.

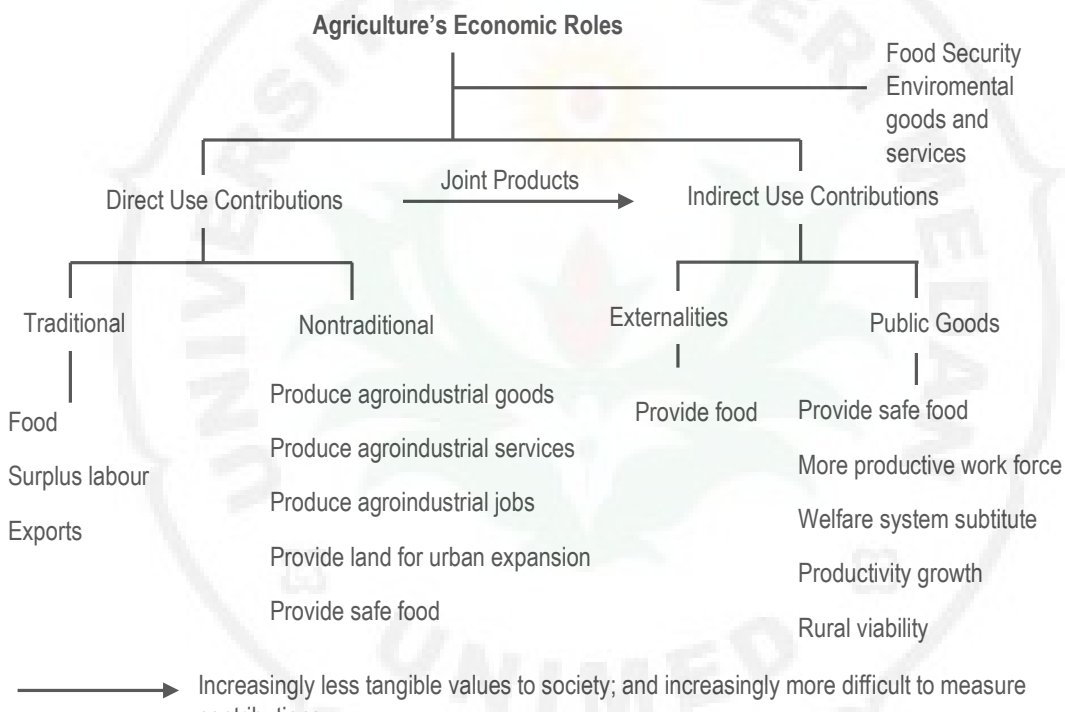
Suselo dan Tarsidin (2008) melakukan kajian tentang struktur perekonomian Indonesia dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Kajian ini menggunakan pendekatan sektoral di mana pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan didekomposisi berdasarkan sektor ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur dan kemiskinan sektoral di Indonesia diukur dengan *head count ratio* yang merupakan fungsi dari pertumbuhan GDP riil dan *share* GDP riil. Sedangkan untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan struktur ekonomi digunakan *income gap ratio* yang juga merupakan fungsi dari GDP riil dan *share* GDP riil dari masing-masing sektor ekonomi.

Tingkat kemiskinan di suatu sektor usaha dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi kemiskinan yang terjadi hanya dalam lingkup sektor usaha yang bersangkutan (dalam hal ini diukur dengan *head count ratio* dan *income gap ratio* sektoral) dan dari sisi kemiskinan di sektor usaha yang bersangkutan secara relatif terhadap kemiskinan di tingkat nasional (yang diukur dengan *head count ratio* dan *income gap ratio* tertimbang (*weighted*)).

Dari hasil kajian diketahui bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor usaha yang paling tinggi tingkat kemiskinannya serta mempunyai elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan dapat menurunkan *income gap ratio* sebesar 1,01 persen. Ini berarti bahwa, setiap pertumbuhan sebesar 1 persen di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat mengurangi kemiskinan nasional sebesar 2,97 persen. Penurunan *share* sektor ini terhadap GDP riil akan memperburuk tingkat kemiskinan Indonesia. Dengan demikian langkah yang

paling tepat untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Hasil studi Stringer (2001) menunjukkan adanya dampak kontribusi sektor pertanian yang lebih luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Gambar 9.9 menunjukkan secara ringkas kontribusi sektor pertanian tersebut.



Gambar 2.9. Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian (Sumber: Stringer, 2001)

Kontribusi sektor pertanian secara langsung dapat dilihat baik secara tradisional maupun nontradisional. Peranan pertanian digolongkan sebagai peranan tradisional dalam pembangunan, seperti kontribusinya terhadap tenaga kerja, pangan, ekspor, transfer modal dan pasar. Sedangkan peranannya terhadap nontradisional apabila sektor pertanian dikaitkan dengan agroindustri, ekspansi lahan bagi perluasan kota, pariwisata dan ketahanan pangan.

Kemudian sektor pertanian yang secara tidak langsung memberi kontribusi terhadap pembangunan ditunjukkan dalam hal pemberian manfaat eksternalitas dan barang-barang publik setelah melalui proses *joint product*. Salah satu manfaat eksternalitas dari peranan sektor pertanian yaitu dalam menghasilkan atau menumbuhkan kepariwisataan (*tourism*). Dampak semacam ini sudah diperlihatkan di Indonesia. Misalnya di Bogor dan Purwosari, yang terkenal dengan kebun rayanya. Kemudian di Bunaken yang dikenal dengan keindahan taman lautnya.

Dan ada juga taman buah di Cileungsi. Semua ini merupakan produk-produk pariwisata yang dihasilkan dari sektor pertanian. Sekiranya potensi-potensi ini terus digali lebih banyak dan lebih luas lagi sehingga langsung menyentuh kehidupan para petani di pedesaan maka hasil pembangunan pertanian akan terlihat lebih optimal lagi, terutama dalam pengurangan kemiskinan penduduk pedesaan (Hafizrianda, 2007).

Selain itu hasil dari Townsend dan McDonald (1997) yang menggunakan SNSE untuk mengkaji berbagai kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan distribusi pendapatan di Afrika Selatan, menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pertanian di Afrika Selatan selain sangat potensial untuk menstimulasi aktivitas sektor-sektor ekonomi lainnya juga dapat menunjang program-program pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Studi dari Bautista (2000) yang mempelajari tentang strategi pembangunan berbasis pertanian (*agriculture based development strategy*) di wilayah Vietnam Pusat memberikan kesimpulan yang hampir sama. Bautista menggunakan analisis multiplier SNSE untuk mengamati dampak pembangunan pertanian terhadap distribusi pendapatan. Dalam hal ini dia menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembangunan yang berbasis pertanian di Vietnam Pusat sangat relevan, mengingat wilayah ini sangat sarat dengan sektor pertanian. Berdasarkan strategi pembangunan tersebut, kenaikan sumber daya masyarakat dapat dialokasikan ke sektor pertanian dan pedesaan yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan menaikkan pendapatan rumah tangga pedesaan, sehingga akan menciptakan kekuatan permintaan terhadap barang-barang produksi nonpertanian dalam pasar lokal.

Studi lainnya seperti oleh Arndt et.al. (1998) yang menggunakan data SAM Mozambiqu 1995 (MOZAM), menyimpulkan bahwa, Pertama, pengembangan pertanian sangatlah bersesuaian dalam membangun keseluruhan kegiatan produksi, nilai tambah dan pendapatan rumahtangga. Kedua, pengembangan pertanian dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Ketiga, strategi pertumbuhan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan harus memfokuskan diri pada sektor pertanian, hal ini diperlihatkan oleh dampak multiplier yang besar pada saat peubah-peubah ini melalui aliran perekonomian *rural people* (masyarakat pedesaan).

3. Determinasi Ketimpangan di Indonesia

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2007). Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah biasanya terjadi kalau hanya diserahkan kepada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar. Perkembangan ekonomi daerah yang diserahkan pada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar cenderung memperbesar ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Sebab dalam kenyataan, kegiatan dan perkembangan ekonomi lebih sering terjadi dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Sebaliknya, pada wilayah lain yang nampak terjadi hanyalah semakin ketertinggalan saja. Pesatnya perkembangan ekonomi suatu wilayah akan kurang menguntungkan untuk wilayah-wilayah lainnya karena terjadi ketertarikan sumberdaya. Realitanya, tenaga kerja, modal, perdagangan akan mengalir pada wilayah-wilayah yang berkembang lebih cepat. Sebagai contoh, tenaga kerja produktif dan profesional akan bermigrasi ke wilayah-wilayah yang kegiatan ekonominya berkembang cepat. Mengalirnya sumberdaya-sumberdaya pada wilayah yang ekonominya berkembang pesat memperlambat berkembangnya wilayah-wilayah lain yang kehilangan sumberdaya seperti tenaga kerja, sumberdaya alam, dan modal (Bakri, dkk, 2015).

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.

2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran.
5. Rendahnya mobilitas social.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis.
7. Kondisi memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi regional antar Kabupaten atau Kota adalah dengan Indeks Williamson. Williamson dalam (Kuncoro, 2004:133) meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Disparitas ekonomi regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih ‘matang’ dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat ketimpangan, tetapi belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Tabel 2.1 memberikan gambaran ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indeks Williamson serta beberapa faktor yang mempengaruhinya

Tabel 3.1. Perkembangan Indeks Williamson, IPM, Pengangguran, PDRB dan Dana Alokasi Umum (DAU) beberapa Provinsi di Indonesia tahun 2017

PROVINSI	IW	IPM	PENGANGGURAN	PDRB	DAU(ribu rupiah)
ACEH	0,241228	70,6	6,98	23,36718	1.930.152.204
SUMUT	0,356276	70,57	6,005	34,18358	2.493.484.717

SUMBAR	0,228882	71,24	5,69	29,30834	1.953.594.421
BABEL	0,17971	69,99	4,12	34,94931	969.535.866
KEPRI	0,276648	74,45	6,8	98,17867	1.043.954.307
JABAR	0,492105	70,69	8,355	27,95616	2.879.143.808
JATENG	0,456634	70,52	4,36	26,09767	3.520.364.822
DIY	0,337916	78,89	2,93	24,53391	1.312.215.989
BANTEN	0,427188	71,42	8,515	32,93336	1.043.042.265
BALI	0,188633	74,3	1,38	34,13734	1.234.481.776
NTB	0,264798	66,58	3,59	19,09868	1.416.022.952
KALTIM	0,402097	75,12	7,73	126,6547	642.101.957
KALTARA	0,069147	69,84	5,355	78,91452	1.163.384.773
SULUT	0,347333	71,66	6,65	32,30168	1.340.353.014
SULSEL	0,410733	70,34	5,19	33,24498	2.266.264.600
SULTRA	0,315817	69,86	3,22	31,90856	1.493.557.900
GORON	0,0584	67,01	3,965	21,48001	971.731.886
SULBAR	0,283176	64,3	3,095	22,06072	977.903.640
MALUKU	0,212898	68,19	8,53	15,94106	1.465.641.669
PAPUA	0,864547	59,09	3,79	45,57869	2.570.118.273

Sumber : BPS (2018), Kemenkeu (2018)

Besarnya indeks williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai indeks ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Kuncoro (2004) menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Ketimpangan tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan sedang jika $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan rendah jika $IW < 0,35$.

Dari Tabel 3.1, hanya Provinsi Papua yang memiliki kriteria tingkat ketimpangan tinggi, provinsi yang memiliki ketimpangan sedang adalah ; Sumut, Jabar, Jateng, Banten, Kaltim dan Sulsel, sedangkan provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan rendah adalah; Aceh, Sumbar, Babel, Kepri, DIY, Bali, NTB, Kaltara, Sulut, Sulbar, Gorontalo dan Maluku,. Provinsi Papua dan Jateng yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi justru mendapatkan DAU yang relative tinggi di banding provinsi lain di Indonesia. Gambaran dari dua indicator ini sekilas menjelaskan bahwa pemberian DAU yang diharapkan dapat menurunkan ketimpangan, justru belum berhasil menurunkan ketimpangan.

Ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh penambahan penduduk, baik dari segi kuantitas dan juga kualitas penduduknya. Kualitas suatu daerah sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia (SDM). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan seseorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan. Secara ringkas, Ranis dan Stewart (2002) mengartikan pembangunan manusia sebagai peningkatan kondisi seseorang sehingga memungkinkan hidup lebih panjang sekaligus lebih sehat dan lebih bermakna. Menurut UNDP (2013), Maipita (2013) indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada satu waktu tertentu dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok status pembangunan manusia ‘Rendah’, ‘Sedang’, ‘Tinggi’, dan ‘Sangat Tinggi’.

Tabel 3.2. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq IPM \leq 70$	Sedang
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Provinsi DIY dan Kaltim , memiliki nilai IPM yang tertinggi di Indonesia, dan jika dilihat tingkat ketimpangannya berada pada tingkat ketimpangan sedang, artinya bahwa seluruh factor factor ini saling berinteraksi mempengaruhi nilai tingkat ketimpangan. Ternyata IPM tinggi, belum mampu menurunkan nilai tingkat ketimpangan. Tidak ada satu factor yang dominan yang mempengaruhi, walaupun dari segi teori, nilai IPM akan berpengaruh negative terhadap tingkat ketimpangan. Begitu juga factor lain, seperti pengangguran dan PDRB, akan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan di suatu provinsi. Penelitian ini menjadi sangat menarik, karena ternyata variable-variebel bebas yang akan diteliti beberapa tidak sesuai dengan teori dan penelitian empiris. Akhirnya memberikan suatu fenomena yang layak untuk diteliti.

3.1. Tren Ketimpangan di Indonesia

Ketimpangan semakin meningkat karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Ketimpangan di Indonesia meningkat pesat. Berdasarkan sebagian besar pengukuran, ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin.

Ukuran ketimpangan yang populer digunakan adalah koefisien Gini, di mana 0 berarti sepenuhnya setara dan 100 berarti sepenuhnya tidak setara. Selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997- 98, saat angka kemiskinan naik tajam rasio Gini juga turun. Semua orang terkena dampak krisis, tetapi segmen masyarakat terkaya terhantam paling keras. Rasio Gini meningkat dari 30 (tahun 2000) menjadi 41 (tahun 2014), yaitu angka tertinggi yang pernah tercatat. Namun, kenaikan ini pun kemungkinan masih lebih rendah dari sebenarnya karena survei rumah tangga biasanya kurang representatif menggambarkan rumah tangga terkaya.² Meskipun dahulu relatif moderat berdasarkan standar internasional, tingkat ketimpangan Indonesia kini menjadi tinggi dan naik lebih cepat daripada sebagian besar negara tetangga di Asia Timur.

Pertumbuhan berkelanjutan selama 15 tahun telah membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan kelas sosial yang mapan secara ekonomi. Setelah pulih dari krisis keuangan Asia, PDB riil per kapita Indonesia tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun antara 2000 dan 2014. Pertumbuhan ini membantu banyak orang keluar dari kemiskinan. Angka kemiskinan berkurang lebih dari separuhnya dari 24 persen saat krisis menjadi 11 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi juga membantu menciptakan kelas menengah yang lebih

kuat dari yang pernah ada sebelumnya. Saat ini terdapat 45 juta orang (18 persen orang terkaya dari seluruh masyarakat Indonesia) yang mapan secara ekonomi dan menikmati kualitas hidup lebih tinggi. Mereka adalah segmen populasi yang berkembang paling pesat, dengan peningkatan 10 persen per tahun sejak 2002.

Namun, kelompok orang Indonesia yang mapan secara ekonomi tersebut meninggalkan 205 juta sisanya di belakang. Manfaat pertumbuhan ekonomi sebagian besar telah dinikmati oleh kelas konsumen yang berkembang. Antara tahun 2003 dan 2010, konsumsi per orang untuk 10 persen warga terkaya Indonesia naik lebih dari enam persen per tahun setelah memperhitungkan inflasi, tapi kenaikannya kurang dari dua persen per tahun untuk 40 persen warga termiskin. Ini berpengaruh pada perlambatan laju pengentasan kemiskinan, dengan jumlah orang miskin turun hanya dua persen per tahun sejak 2002, dan nyaris tidak ada penurunan pada jumlah orang yang rentan kemiskinan.

Untuk memahami apa yang mendorong ketimpangan di Indonesia dan mengapa ketimpangan meningkat, kita perlu memahami sumber daya apa saja yang dimiliki rumah tangga yang berbeda dan bagaimana mereka menggunakannya untuk menghasilkan pendapatan.

Setiap rumah tangga menggunakan sumber daya berbeda untuk menghasilkan pendapatan: bisa berupa tenaga untuk mendapatkan upah dan gaji atau berupa aset keuangan dan fisik. Kunci untuk memahami peningkatan ketimpangan adalah memahami mengapa sebagian rumah tangga memiliki pekerjaan lebih baik dan penghasilan lebih besar, sementara sebagian lainnya memiliki aset keuangan lebih banyak dan penghasilan lebih besar. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketimpangan adalah bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan: seberapa banyak yang dikonsumsi (dan harus dibagi untuk berapa orang) dan yang ditabung. Selain itu, guncangan dan bencana dapat tiba-tiba mengikis aset dan pendapatan rumah tangga sehingga penting untuk memahami mengapa rumah tangga kaya lebih mampu bertahan menghadapi masalah semacam itu.

Ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia yang memengaruhi generasi sekarang maupun masa depan. Dengan menerapkan kerangka di atas, kami menemukan bahwa ada empat pendorong utama ketimpangan di Indonesia. Pertama, ketimpangan peluang berarti tidak semua orang dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan berupah tinggi. Kedua, dengan semakin besarnya tuntutan untuk memiliki keterampilan yang tepat dalam ekonomi modern, imbalan bagi mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan bagus semakin tinggi. Sementara mereka yang tidak punya keterampilan yang dibutuhkan, terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Jika kedua faktor ini digabungkan maka ketimpangan upah

meningkat. Ketiga, semakin terpusatnya sumber daya keuangan di tangan segelintir rumah tangga kaya menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi saat ini dan memperkuat ketimpangan sumber daya manusia dan keuangan pada generasi berikutnya. Keempat, guncangan dapat memengaruhi ketimpangan pada tahap mana pun dalam kerangka ini dengan cara mengikis kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan, menabung, dan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan. Pada bagian berikutnya kita akan membahas masing-masing faktor pendorong ini

3.2.Studi Pendahuluan yang Sudah Dilakukan dan Hasil yang sudah dicapai.

Penelitian tahun 2012, melakukan penelitian yang berjudul “ Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidy Diversion to Non Food Crops” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kebijakan pengalihan subsidi BBM ke sector pertanian tanaman lainnya memeberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan pengurangan angka kemiskinan. (2) kebijakan pengalihan subsidi BBM ke sektor pertanian memberikan dampak yang lebih baik bagi kelompok rumah tangga di desa dibanding dengan kelompok rumah tangga di kota

Penelitian tahun 2015, melakukan penelitian yang berjudul “ Profil Kelas Menengah dan Peranannya terhadap Perekonomian Indonesia “ . Hasil penelitan menunjukkan bahwa: (1) dari hasil estimasi data PDB selama 2 tahun (1993-2012), diperoleh Marginal Propensity to Consume (MPC) sebesar 0,779 , nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 78% dari pendapatan masyarakat, digunakan untuk konsumsi; (2) tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional lebih tinggi disbanding dengan tingkat ketimpangan pad akelompok kelas menengah. Diantara ketiga kriteria kelas menengah, tingkat ketimpangan pada kriteria World bank lebih rendah disbanding dengan dua kriteria lainnya, diikuti dengan kriteria 60 persen ditengah, dan kriteria USD; (3) selama kurun waktu pengamatan (2004-2012), trend ketimpangan nasional mengalami peningkatan, demikian juga dengan trend ketimpangan pada kelas menengah dengan kriteria 60 persen dan kriteria word bank. Tetapi tidak demikian pada kelas menengah dengan kriteria USD, trend ketimpangan justru menurun; (4) kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah di Indonesia memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum kontribusi kenaikan tingkat pendapatan hingga 20 persen.

Penelitian tahun 2015, melakukan penelitian yang berjudul “ Pengembangan Model Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Tangga” Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan secara baik, dampak simulasi terhadap berbagai hal, seperti dampak terhadap berbagai indicator makro ekonomi utama, dan

beberapa indikator ekonomi sektoral, Model ini juga menghasilkan simulasi yang sesuai dengan teori ekspansif fiskal dan moneter.

3.3 Analisis Determinan Faktor Ketimpangan di Indonesia

Metode yang digunakan adalah regresi dengan menggunakan data panel (*pooled data*) atau disebut model regresi data panel. Sebelum mengetahui pemodelan regresi data panel, maka perlu dikaji model regresi linier menggunakan data *cross section* dan *time series*.

Model dengan data *cross section*

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i ; i = 1,2,\dots,N \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

N : banyaknya data *cross section*

Model dengan data *time series*

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t ; t = 1,2,\dots,T \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

N : banyaknya data *time series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *time series* (antar waktu) dan data *cross section* (antar individu/ruang), maka dalam model data panel, unit *cross section* yang sama di survei dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003: 637) dan model data panel dapat dituliskan dengan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ; i = 1,2,\dots,N; t = 1,2,\dots, T \quad \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana :

i = banyaknya observasi

t = banyaknya waktu

i x t = banyaknya data panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain metode Kuadrat Terkecil Biasa (*Pooled Least Square/PLS*), Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model/FEM*), dan Model Efek Random (*Random Effect Model/REM*).

Analisis *Data Panel* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dampak fluktuasi jumlah penduduk, upah minimum regional, harga beras, tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat inflasi kabupaten dan kotamadya di Sumatera Utara. Dari variable yang digunakan, maka dapat dibentuk model penelitian sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana:

Y_{it} = Indeks Williamson (%)

X_1 = Pendapatan Domestik Bruto Provinsi (ribu rupiah)

X_2	= Tingkat Pengangguran (juta orang)
X_3	= Dana Alokasi Umum (ribu rupiah)
X_4	= Indeks pembangunan Manusia
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
α_{it}	= <i>Intercept</i> (Konstanta)
ϵ_{it}	= Kesalahan pengganggu

Definisi operasional dari seluruh variabel yang digunakan di dalam model empiris:

1. Indeks Williamson adalah Indeks mengukur ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya di Sumatera Utara secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.
2. Pendapatan Domestik Regional Bruto adalah Jumlah Pendapatan dari seluruh sector perekonomian di seluruh provinsi di Indonesia
3. Tingkat Pengangguran adalah penduduk usia kerja (15-65 th) yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja
4. Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
5. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam satuan persen

3.4. Membentuk Model Ketimpangan Pertumbuhan dan Pertumbuhan di Indonesia

Untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian ini, yaitu membentuk Model Ketimpangan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, diperlukan uji-uji asumsi terlebih dahulu, selanjutnya diikuti dengan *me run* data untuk mendapatkan model. Berikut akan diuraikan tahapan seseuai dengan desain penelitian di bab 3.

3.1 Uji Kesesuaian Model Regresi Data Panel

Data panel adalah gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, dimana *cross section* dalam penelitian ini berupa provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi data panel dapat dimungkinkan untuk menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda. Analisis regresi dengan menggunakan data panel mempunyai beberapa

keuntungan. Menurut Hsiao (1992), keuntungan-keuntungan menggunakan analisis regresi data panel adalah:

1. Memperoleh hasil estimasi yang lebih baik karena seiring dengan peningkatan jumlah observasi yang otomatis berimplikasi pada peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*)
2. Menghindari kesalahan penghilangan variabel (*omitted variable problem*).

Menurut Baltagi, 1995, keuntungan-keuntungan menggunakan analisis regresi data panel antara lain:

1. Mengatasi masalah heterogenitas individu (*individual heterogeneity*).
2. Memberikan data yang lebih informatif, mengurangi masalah kolinieritas pada variabel, mengatasi masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*), dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar;
3. Mempelajari perubahan yang bersifat dinamis (*dynamics of adjustment*)
4. Dapat mengidentifikasi dan menghitung efek yang tidak dapat dilakukan pada analisis *time series* atau *cross section* murni;
5. Dapat mengurangi bias dalam pengestimasiannya karena data cukup banyak.

Model regresi data panel yang umumnya digunakan terdapat tiga macam, yaitu *Common Effects Model (Pooled Least Square – PLS)*, *Fixed Effects Model (Model Efek Tetap – MET)*, dan *Random Effects Model (Model Efek Random – MER)*. Uji yang harus dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik adalah dengan melakukan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier (LM)*.

a. Uji *Chow*

Uji ini dilakukan untuk menentukan model apakah *Common Effect (CE)* ataukah *Fixed Effect (FE)* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis yang digunakan adalah:

H₀: Pilih *Common Effect (CE)*

H₁: Pilih *Fixed Effect (FE)*

Pengambilan keputusan untuk uji *Chow* adalah dengan melihat nilai probabilitas (Prob.) untuk *Cross-section F*. Jika nilainya $> 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect (CE)*, tetapi jika nilai Prob yang diperoleh $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect (FE)*.

Tabel 3.3. Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests				
Pool: DATAPANEL				
Test period fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Period F	2.404452	(7,253)	0.0213	
Period fixed effects test equation: Dependent Variable: LNIW? Method: Panel EGLS (Period weights) Date: 10/06/19 Time: 13:24 Sample: 2010 2017 Included observations: 8 Cross-sections included: 33 Total pool (balanced) observations: 264 Use pre-specified GLS weights				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.091268	0.250572	-4.355101	0.0000
LNTKT?	-0.013196	0.001072	-12.30945	0.0000
LNIPM?	0.322540	0.058406	5.522323	0.0000
LND AU?	0.041172	0.011246	3.661001	0.0003
Weighted Statistics				
R-squared	0.523721	Mean dependent var	0.078752	
Adjusted R-squared	0.518225	S.D. dependent var	0.091608	
S.E. of regression	0.063002	Sum squared resid	1.032001	
F-statistic	95.29936	Durbin-Watson stat	0.340697	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.466447	Mean dependent var	0.075485	
Sum squared resid	1.018150	Durbin-Watson stat	0.338492	

Dari hasil pengolahan data uji chow yang disajikan pada tabel 5.5 di atas diperoleh nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,000000 yang artinya bahwa nilai yang diperoleh adalah $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*.

b. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Metode *Fixed Effect Model*

Hasil uji model penelitian ini dengan menggunakan perangkat program Eviews 8.1. Penelitian ini menghadapi perilaku provinsi yang diregresi secara sistem (multi persamaan). Pada estimator ini, persamaan yang diestimasi terdiri dari 34 provinsi di Indonesia dengan

waktu observasi tahunan (*Annual*) dari tahun 2010-2017. Tabel 3.4 menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode *Fixed Effect*. Dari hasil estimasi model penelitian selanjutnya akan di analisis uji statistik signifikansi dan analisis uji apriori ekonomi (arah dan kebermaknaan).

Tabel 3.4. Hasil Estimasi Model Persamaan Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Dependent Variable: LNIW?				
Method: Pooled EGLS (Period weights)				
Date: 10/06/19 Time: 13:23				
Sample: 2010 2017				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 264				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.628645	0.283467	-2.217703	0.0275
LNTKT?	-0.014962	0.001153	-12.98163	0.0000
LNIPM?	0.216383	0.066046	3.276226	0.0012
LNDAU?	0.053569	0.011720	4.570648	0.0000
Fixed Effects (Period)				
2010—C	-0.023703			
2011—C	-0.007072			
2012—C	0.003254			
2013—C	0.005178			
2014—C	0.005160			
2015—C	-0.021000			
2016—C	0.019542			
2017—C	0.018641			
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.553429	Mean dependent var		0.078752
Adjusted R-squared	0.535778	S.D. dependent var		0.091608
S.E. of regression	0.061843	Sum squared resid		0.967628
F-statistic	31.35397	Durbin-Watson stat		0.344341
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				

R-squared	0.488039	Mean dependent var	0.075485
Sum squared resid	0.976947	Durbin-Watson stat	0.352862

Sumber: Hasil Output Data Panel diolah dengan Eviews 8.1

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 5.6 diatas dapat dituliskan secara umum **Model Persamaan Ketimpangan di Indonesia** adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG (IW)} = -0,628 - 0,015 \text{ LOG (Tingkat Pengangguran)} + 0,217 \text{ LOG (IPM)} + 0,053 \text{ LOG (DAU)}$$

Interpretasi dari bentuk persamaan diatas adalah apabila variabel-variabel bebas tingkat pengangguran, IPM dan DAU diasumsikan nol, maka akan turun sebesar 62,8%.

c. Analisis Uji Statistik Signifikansi

Berdasarkan output estimasi regresi data panel dengan metode *fixed effect* diatas maka dapat kita lakukan analisis uji statistik sebagai berikut:

a. Uji Parsial / *Partial Test* (t-test)

Uji parsial variabel-variabel bebas dapat dilihat dari nilai probabilitinya. Jika nilai probabilitinya lebih kecil dari 5 % berarti variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas. Jika nilai probabilitinya lebih besar dari 5% berarti variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas.

Dari tabel hasil pengolahan dengan menggunakan Eviews 8.1 diatas dapat dilihat bahwa variabel bebas yaitu Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap variabel tak bebas Indeks Williamson (tingkat ketimpangan).

b. Uji Serentak / *Overall* (F-test)

Pengujian secara serentak dapat dilakukan dengan melihat Prob (F-statistic). Jika nilai probabiliti dari F-statistic lebih kecil dari 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap perubahan pada variabel tak bebas. Sebaliknya, jika nilai probabiliti dari F-statistic lebih besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pada variabel tak bebas.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Prob(F-statistic) adalah sebesar 0.00000, lebih kecil dari 5% yang berarti bahwa variabel-variabel bebas Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara serentak

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel tak bebas Indeks Williamson (Tingkat Ketimpangan).

c. Koefisien Determinasi / *Coefficient Determinant* (R^2)

Dari nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat apakah variasi perubahan dari nilai variabel tak bebas mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel bebasnya. Nilai R^2 terletak diantara angka 0 dan 1. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam model semakin menjelaskan variasi variabel tak bebas. Model dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin dekat dengan 1 (Gujarati, 2003).

Dari tabel 4.7 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.553429, menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai variabel tak bebas Indeks Williamson mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel bebasnya yaitu variabel Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Umum sebesar 55,34% sedangkan sisanya sebesar 44,66 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.

d. Uji Asumsi Klasik

Model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan regresi linier berganda, maka diperlukan adanya uji asumsi klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran asumsi. Asumsi tersebut adalah tidak adanya heteroskedastisitas (*heterocedasticity*), multikolinearitas (*multicolinearity*) dan autokorelasi (*autocorrelation*). Terpenuhinya asumsi klasik diperlukan agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dengan memenuhi standar kondisi *Best Linier Unbiased Estimation* (BLUE). Uji Normalitas juga dilakukan pada data penelitian untuk melihat apakah data penelitian sudah mengikuti distribusi normal.

e. Uji Heteroskedastisitas (*Heteroscedasticity*)

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3.5. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(ABS(RESID?))				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 10/06/19 Time: 13:50				
Sample: 2010 2017				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 264				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-15.26597	5.033883	-3.032643	0.0027

LNTKT?	-0.003907	0.022905	-0.170559	0.8647
LNIPM?	2.496005	1.172479	2.128828	0.0342
LNDAU?	0.712740	0.206682	3.448480	0.0007
Fixed Effects (Period)				
2010—C	-0.232442			
2011—C	0.042421			
2012—C	0.256969			
2013—C	0.168590			
2014—C	0.215340			
2015—C	-0.291620			
2016—C	-0.096001			
2017—C	-0.063258			
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.111196	Mean dependent var	-3.500165	
Adjusted R-squared	0.076065	S.D. dependent var	1.085445	
S.E. of regression	1.043346	Akaike info criterion	2.963516	
Sum squared resid	275.4083	Schwarz criterion	3.112514	
Log likelihood	-380.1841	Hannan-Quinn criter.	3.023388	
F-statistic	3.165221	Durbin-Watson stat	0.549500	
Prob(F-statistic)	0.000768			

Sumber : Hasil Olah Dengan EViews 8.1

Salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser, yaitu dengan menggunakan nilai absolut residual sebagai variabel dependen. Jika nilai probabiliti $<$ nilai $\alpha = 5\%$ maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabiliti $>$ nilai $\alpha = 5\%$ maka dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil pengolahan dengan software Eviews 8.1 pada tabel 4. didapat bahwa semua koefisien variabel independen signifikan maka dapat disimpulkan tidak adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

b. Uji Multikolinieritas (*Multicollinearity*)

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Multikolinieritas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini

disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi.

Tabel 3.6. Uji Multikolinearitas R1

Dependent Variable: LNIW?				
Method: Pooled EGLS (Period weights)				
Date: 10/06/19 Time: 14:01				
Sample: 2010 2017				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 264				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.628645	0.283467	-2.217703	0.0275
LNIPM?	0.216383	0.066046	3.276226	0.0012
LNTKT?	-0.014962	0.001153	-12.98163	0.0000
LND AU?	0.053569	0.011720	4.570648	0.0000
Fixed Effects (Period)				
2010--C	-0.023703			
2011--C	-0.007072			
2012--C	0.003254			
2013--C	0.005178			
2014--C	0.005160			
2015--C	-0.021000			
2016--C	0.019542			
2017--C	0.018641			
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.553429	Mean dependent var		0.078752
Adjusted R-squared	0.535778	S.D. dependent var		0.091608
S.E. of regression	0.061843	Sum squared resid		0.967628
F-statistic	31.35397	Durbin-Watson stat		0.344341
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.488039	Mean dependent var		0.075485
Sum squared resid	0.976947	Durbin-Watson stat		0.352862
R-squared	0.553429			

Tabel 3.7. Multikolinearitas 2

Dependent Variable: LNTKT?				
Method: Pooled EGLS (Period weights)				
Date: 10/06/19 Time: 13:59				
Sample: 2010 2017				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 264				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45.03713	5.487373	8.207413	0.0000
LND AU?	-0.254452	0.236218	-1.077194	0.2824
LNIPM?	-5.676001	1.331697	-4.262233	0.0000
Fixed Effects (Period)				
2010--C	-1.536520			
2011--C	-0.545747			
2012--C	-0.325278			
2013--C	-0.067603			
2014--C	0.028976			
2015--C	-0.970991			
2016--C	1.679531			
2017--C	1.737633			
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.185851	Mean dependent var		35.23691
Adjusted R-squared	0.157003	S.D. dependent var		20.29646
S.E. of regression	2.476059	Sum squared resid		1557.241
F-statistic	6.442449	Durbin-Watson stat		0.475402
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.171255	Mean dependent var		20.57980
Sum squared resid	2203.236	Durbin-Watson stat		0.730123
R-squared	0.185851			

Tabel 3.8.. Multikolinearitas 3

Dependent Variable: LNIPM?				
Method: Pooled EGLS (Period weights)				
Date: 10/06/19 Time: 14:00				
Sample: 2010 2017				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 264				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.261055	0.032465	131.2524	0.0000
LNTKT?	-0.006286	0.001118	-5.623959	0.0000
LND AU?	0.052747	0.010553	4.998392	0.0000
Fixed Effects (Period)				
2010--C	-0.048410			

2011--C	-0.031795		
2012--C	-0.013073		
2013--C	-0.000246		
2014--C	0.008932		
2015--C	0.005574		
2016--C	0.034914		
2017--C	0.044103		
Effects Specification			
Period fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.287442	Mean dependent var	4.238322
Adjusted R-squared	0.262194	S.D. dependent var	0.192790
S.E. of regression	0.05584	Sum squared resid	0.791823
F-statistic	11.38470	Durbin-Watson stat	0.078987
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.283227	Mean dependent var	4.227489
Sum squared resid	0.791889	Durbin-Watson stat	0.078602
R-squared	0.287442		

Tabel 3.9.. Multikolinearitas 4

Dependent Variable: LNDAU?				
Method: Pooled EGLS (Period weights)				
Date: 10/06/19 Time: 13:56				
Sample: 2010 2017				
Included observations: 8				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 264				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.272392	1.482779	-3.555751	0.0004
LNTKT?	-0.005743	0.006616	-0.868055	0.3862
LNIPM?	1.704707	0.337550	5.050239	0.0000
Fixed Effects (Period)				
2010--C	0.208298			
2011--C	0.166493			
2012--C	-0.005435			
2013--C	-0.054352			
2014--C	-0.092193			
2015--C	-0.011009			
2016--C	-0.091930			
2017--C	-0.119872			
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.185182	Mean dependent var	1.831147	
Adjusted R-squared	0.156310	S.D. dependent var	0.383749	

S.E. of regression	0.316741	Sum squared resid	25.48252
F-statistic	6.413986	Durbin-Watson stat	0.111537
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.178725	Mean dependent var	1.816042
Sum squared resid	25.48333	Durbin-Watson stat	0.116926

R-squared 0.185182

Kesimpulan karena $R_1^2 = 0.553429 > R_2^2 = 0.185851$; $R_3^2 = 0.287442 > R_4^2 = 0.185182$; maka Model fixed effect tidak mengandung multikolinearitas.

e. Analisis Uji Apriori Ekonomi (Arah Dan Kebermaknaan)

Uji apriori ekonomi menjelaskan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas dengan melihat nilai probabiliti dari nilai t-statistik untuk melihat tingkat signifikansi dan juga uji arah atas nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas.

Model Persamaan Ketimpangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

$$\text{LOG (IW)} = -0,628 - 0,015 \text{ LOG (Tingkat Pengangguran)} + 0,217 \text{ LOG (IPM)} + 0,053 \text{ LOG (DAU)}$$

a. Pengaruh Variabel Bebas Tingkat Pengangguran

Hasil estimasi menghasilkan nilai koefisien untuk variabel bebas tingkat pengangguran sebesar - 0,015 dan bertanda negatif Hal ini dapat diartikan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh negative terhadap Tingkat Ketimpangan (Indeks Williamson) di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan semakin menurun tingkat ketimpangan di Indonesia Peningkatan tingkat ketimpangan sebesar 1% akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 1,5% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/*ceteris paribus*. Dilihat dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai probabiliti sebesar 0,0000 Nilai tersebut $< \alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Ketimpangan di Indonesia pada tingkat keyakinan 95% ataupun 90%.

Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena kenaikan upah mereka lebih lambat dibanding gaji pekerja terampil, ketimpangan

ekonomi di Indonesia melebar. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan (jatmiko, 2018).

Dibandingkan dengan hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan yang telah diperdebatkan selama beberapa dekade, diskusi mengenai hubungan antara ketimpangan dan pengangguran agak jarang dilakukan. Lebih jauh, kajian-kajian yang hanya sedikit itu hanya membahas dampak pengangguran terhadap ketimpangan. Kami tidak menemukan kajian yang membahas sebaliknya.

Di sisi lain, sekarang di dunia nyata kita melihat adanya konsekuensi yang besar atas angka pengangguran yang tinggi dan tidak turun-turun, yaitu meningkatnya ketidakpuasan sosial yang tentunya dapat menimbulkan gejolak sosial yang, menurut World of Work Report (ILO, 2011), didorong oleh ketimpangan. Faktanya amat jelas di beberapa wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah bahwa pengangguran yang tinggi dan persisten bukan hanya berhubungan dengan kemiskinan yang lebih tinggi, tetapi juga dengan ketimpangan yang lebih tinggi karena para penganggur akan kehilangan lebih banyak pendapatan secara proporsional dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan (Nickell, 1990, dalam Castells-Quintana dan Royuela, 2012). Walaupun demikian, belum jelas apakah hal ini dapat diberlakukan di Indonesia karena pengangguran tidak selalu berhubungan dengan kemiskinan. Orang miskin bahkan perlu bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Castells-Quintana dan Royuela (2012) berpendapat bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar teoretis untuk memperkirakan bahwa pengangguran yang tinggi dan persisten menurunkan pertumbuhan tampaknya terkait erat dengan ketimpangan. Lebih jauh, mereka berpandangan bahwa pengangguran akan menyebabkan ketimpangan. Mereka menemukan bahwa dampak negatif dari angka pengangguran yang tinggi terhadap pertumbuhan jangka panjang akan lebih revelan jika dihubungkan dengan meningkatnya ketimpangan.

Leibbrand et al. (n.d) menguraikan situasi ketimpangan dan ketenagakerjaan di Afrika Selatan. Diketahui secara luas, bahwa di Afrika Selatan, setelah masa apartheid berakhir, pendapatan makin terkonsentrasi pada lapisan kelompok pendapatan tertinggi dengan mengorbankan kelompok-kelompok lainnya. Ketimpangan ini diperkuat dengan fakta bahwa partisipasi angkatan kerja paling tinggi ada pada kelompok pendapatan tertinggi yang juga memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi. Oleh karena itu, relatif jelas bahwa penguraian sumber pendapatan mengidentifikasi pasar tenaga kerja sebagai faktor utama yang mendorong ketimpangan di Afrika Selatan.

Selain ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan di antara kelompok-kelompok ras di Afrika juga menjadi salah satu hal yang dapat menjelaskan tingginya tingkat pengangguran di kalangan orang Afrika serta rendahnya pendapatan rata-rata mereka. Kebijakan pendidikan di bawah rezim apartheid begitu nyata ketimpangannya antarras. Sebagian besar sumber daya negara dicurahkan kepada wilayah “kulit putih”, sedangkan populasi kulit hitam hanya diberikan pendidikan yang paling rendah kualitasnya. Walaupun sudah ada perubahan besar pada alokasi sumber daya negara, ketimpangan pendidikan belum juga teratasi. Ketimpangan dalam kualitas pendidikan juga menjadi masalah besar, terutama bagi orang-orang Afrika. Keterampilan yang lebih rendah menyebabkan upah mereka menjadi lebih rendah dan juga menjadi hambatan dalam memperoleh pekerjaan sehingga memperkuat lingkaran setan kemiskinan dan ketimpangan.

b. Pengaruh Variabel Bebas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil estimasi menghasilkan nilai koefisien untuk variabel bebas IPM sebesar 0,217 dan bertanda positif. Hal ini dapat diartikan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap Tingkat Ketimpangan di Indonesia. Semakin tinggi jumlah IPM maka akan semakin meningkatkan tingkat Ketimpangan di Indonesia. Peningkatan IPM sebesar 1% akan meningkatkan tingkat Ketimpangan di Indonesia sebesar 2,17 % dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/*ceteris paribus*. Dilihat dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0012. Nilai tersebut $< \alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel IPM berpengaruh

signifikan terhadap Tingkat Ketimpangan di Indonesia pada tingkat keyakinan 95% ataupun 90%.

Peningkatan IPM di Indonesia akan mengakibatkan tingkat ketimpangan meningkat, kondisi bisa terjadi karena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, atau yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, hanya terpusat didaerah perkotaan atau pusat pemerintahan, akibatnya penyebaran sumber daya manusia menjadi tidak merata diseluruh pelosok daerah di Indonesia, sehigga tingkat ketimpangan menjadi semakin meningkat.

c. Pengaruh Variabel Bebas Dana Alokasi Umum (DAU)

Hasil estimasi menghasilkan nilai koefisien untuk variabel bebas DAU sebesar 0,0053 dan bertanda positif. Hal ini dapat diartikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Tingkat Ketimpangan di Indonesia. Semakin tinggi jumlah DAU maka akan semakin meningkatkan tingkat Ketimpangan di Indonesia. Peningkatan IPM sebesar 1% akan meningkatkan tingkat Ketimpangan di Inodnesia sebesar 0,5 % dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap/*ceteris paribus*. Dilihat dari hasil pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai probabiliti sebesar 0,0000. Nilai tersebut $< \alpha = 5\%$ yang berarti bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Ketimpangan di Indonesia pada tingkat keyakinan 95% ataupun 90%.



4. Dampak Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan

Indeks Williamson adalah Indeks mengukur ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya di Sumatera Utara secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.

4.1 Hubungan antara Ketimpangan dan Pertumbuhan

Keterkaitan antara ketimpangan dan pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, bisa diterangkan dalam kerangka hubungan kausalitas dua arah. Pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi memengaruhi ketimpangan? Karya penting Kuznets (1955) menjadi dasar untuk memahami hubungan ini. Dia mengemukakan bahwa saat ekonomi bertumbuh, ketimpangan akan bertambah, kemudian lama-kelamaan akan berkurang. Situasi inilah yang diacu sebagai hipotesis U terbalik Kuznets.

Sebagaimana diterangkan dalam Barro (2000), ide-ide Kuznets bertumpu pada gagasan mengenai pergerakan para pekerja, dari sektor pertanian ke sektor industri. Dalam model ini, sektor pertanian dan perdesaan pada awalnya merupakan sebagian besar dari seluruh kegiatan ekonomi. Sektor ini bercirikan pendapatan per kapita yang rendah dengan hanya sedikit ketimpangan di dalam sektor. Sementara itu, sektor industri dan sektor perkotaan dimulai dari sektor yang kecil, memiliki pendapatan per kapita tinggi, dengan ketimpangan yang tinggi di dalam sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan beralihnya pekerja dan sumber daya dari sektor pertanian ke sektor industri. Para pekerja yang berpindah mengalami peningkatan pendapatan per kapita, dan perubahan ini meningkatkan ketimpangan dalam perekonomian secara umum. Sebagai konsekuensinya, pada tahap awal pertumbuhan, hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan cenderung positif.

Saat sektor pertanian berkurang dan sektor industri bertambah, dampak utama terhadap ketimpangan dari terjadinya urbanisasi adalah makin banyaknya buruh tani miskin yang masuk ke sektor industri yang lebih menjanjikan. Hal ini akan mengurangi ketimpangan secara umum. Dengan demikian, pada tahap pembangunan berikutnya, hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan cenderung negatif.

Berdasarkan pengalaman di Indonesia, sebagian peneliti membantah hal itu dan menyatakan bahwa Indonesia tidak mengikuti prediksi Kuznets pada tahap awal pembangunannya. Selama tiga dekade sebelum krisis keuangan Asia (KKA), Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi seraya tetap mempertahankan rasio Gini yang stabil (sekitar 0,32–0,36). Namun, cerita berubah setelah Indonesia pulih dari KKA. Walaupun pemulihan ekonomi tergolong cepat setelah KKA, dan bertahan cukup baik saat menghadapi krisis keuangan global (KKG) 2008, rasio Gini meningkat tajam hingga mencapai titik tertinggi, yakni 0,41 pada 2011 (Tadjoeddin, 2013a; 2013b).

Indonesia bukan satu-satunya yang mengalami kasus unik ini. Deininger dan Squire (1998) menunjukkan bahwa banyak negara yang mulai dari pendapatan per kapita rendah dapat berkembang pesat tanpa mengalami peningkatan ketimpangan. Di sisi lain, negara-negara lain yang gagal bertumbuh tidak kebal terhadap kemungkinan perubahan besar dalam ukuran agregat ketimpangan. Di beberapa negara pada wilayah mana terdapat hubungan signifikan antara pertumbuhan dan ketimpangan, baik kontradiksi maupun konfirmasi atas hipotesis Kuznets sama-sama bisa terjadi.

Hubungan kausalitas kedua adalah bagaimana ketimpangan memengaruhi perkembangan ekonomi. Banyak literatur mengenai dampak ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi, telah ada sejak abad yang lalu. Dalam bab ini, kami memperkenalkan secara singkat beberapa teori utama. Dengan teori-teori ini berbagai jalur penyebab telah dieksplorasi dalam ratusan makalah penelitian. Jalur-jalur utama yang telah ditampilkan adalah: pendekatan klasik (tingkat tabungan), pendekatan ekonomi politik (redistribusi), saluran ketidaksempurnaan pasar kredit, pendekatan perburuan rente, pendekatan keresahan sosial (instabilitas politik), dan yang terbaru adalah teori terpadu ketimpangan dan pertumbuhan.



Gambar4.1. Fluktuasi Ketimpangan di Indonesia

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa ketimpangan atau dalam hal ini diukur dengan indeks Williamson pada periode 2010-2017 cenderung meningkat, artinya distribusi pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia semakin tidak merata. Peningkatan ketimpangan dimulai pada tahun 2011 selanjutnya ketimpangan terus meningkat hingga tahun 2017. Peningkatan yang sangat besar ini bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitas. Sumber daya manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan, memegang peranan penting demi tercapainya tujuan suatu negara.

Peningkatan pendapatan nasional juga merupakan tujuan nasional, namun terkadang lupa bahwa distribusi pendapatan itu juga penting sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Bertumpuknya seluruh factor produksi di daerah perkotaan karena lengkapnya sarana dan prasarana di kota, mengakibatkan desa dan seluruh pelosok wilayah di Indonesia menjadi lumbung kemiskinan, sehingga ketimpangan semakin meningkat.

Ketimpangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan pada suatu daerah dalam mendorong pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat daerah yang maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara horizontal yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang (Sjafrizal, 2008).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara anggota G-20. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak 2000 hingga 2017,

Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4 persen setiap tahun, setelah China dan India, yang masing-masing tumbuh 9 persen dan 5,5 persen per tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antarpenduduk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an. Krisis moneter 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Indeks. Ketimpangan didorong oleh kelas konsumen. Laporan Bank Dunia pada 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20 persen kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang berpendapatan bersih per tahun di atas 3.600 dollar AS atau Rp 52,6 juta dan pengeluaran per hari nya sekitar 10 dollar AS hingga 100 dollar AS untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Saat ini, setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada 2030 atau setengah dari total penduduk Indonesia. Sejak tahun 2000, kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan dua hal: kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat. Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan pajak negara dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

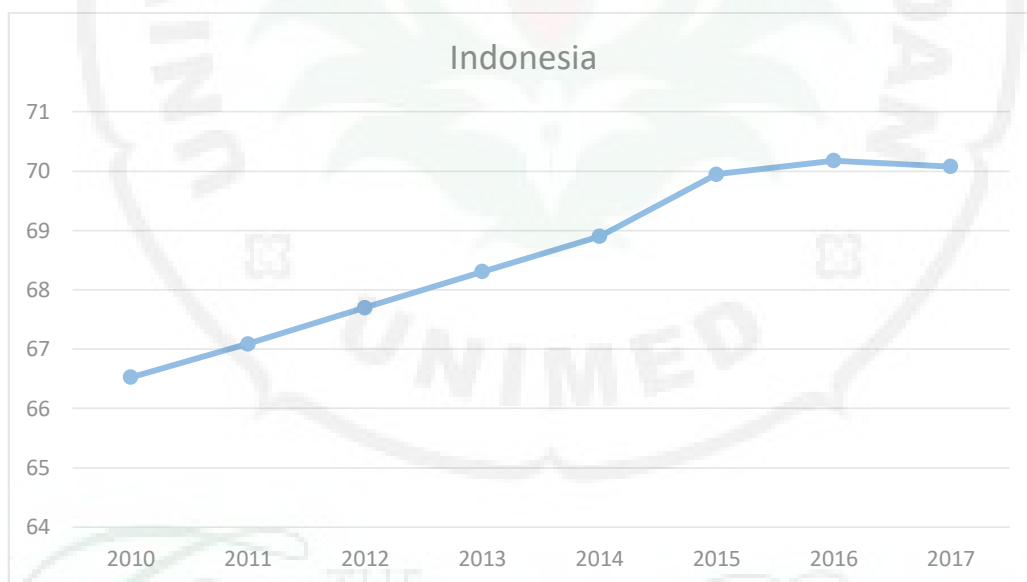
4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Maipita (2013) HDI (*human development index*) merupakan suatu ukuran dimensi kunci dari pembangunan manusia. Mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu panjang umur dan sehat, akses terhadap pengetahuan dan standar hidup layak.

Indikator dari dimensi hidup panjang dan sehat adalah harapan hidup saat lahir, sedangkan indikator untuk dimensi akses terhadap pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah (diukur dalam tahun) dan harapan sekolah (juga diukur dalam tahun). Indikator untuk dimensi standar hidup layak diukur melalui pendapatan Nasional bruto (PNB) yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli atau *purchasing power parity* (Maipita, 2013)

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*Infant mortality rate*); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara pembangunan, memegang peranan sentral demi terlaksananya pembangunan di suatu negara. Indonesia dikatakan memiliki bonus demografi memiliki peluang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan. Sayangnya Indonesia hanya punya jumlah angkatan kerja yang melimpah, tetapi tidak dengan kualitas tenaga kerjanya. Berikut adalah gambaran fluktuasi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia



Gambar 4.2 . Fluktuasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Dari dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2010-2017 terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini mengindikasikan peningkatan kualitas manusia secara umum. Program yang dilakukan pemerintah misalnya penerapan wajib belajar selama 9 tahun, bantuan-bantuan berupa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi berhasil mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berpacu untuk meningkatkan kualitas diri.

Tapi hal ini akan berbeda jika membandingkan Gambar 1 dan Gambar 2, bahwa peningkatan Indeks Pembanguna Manusia belum berhasil menurunkan tingkat ketimpangan di

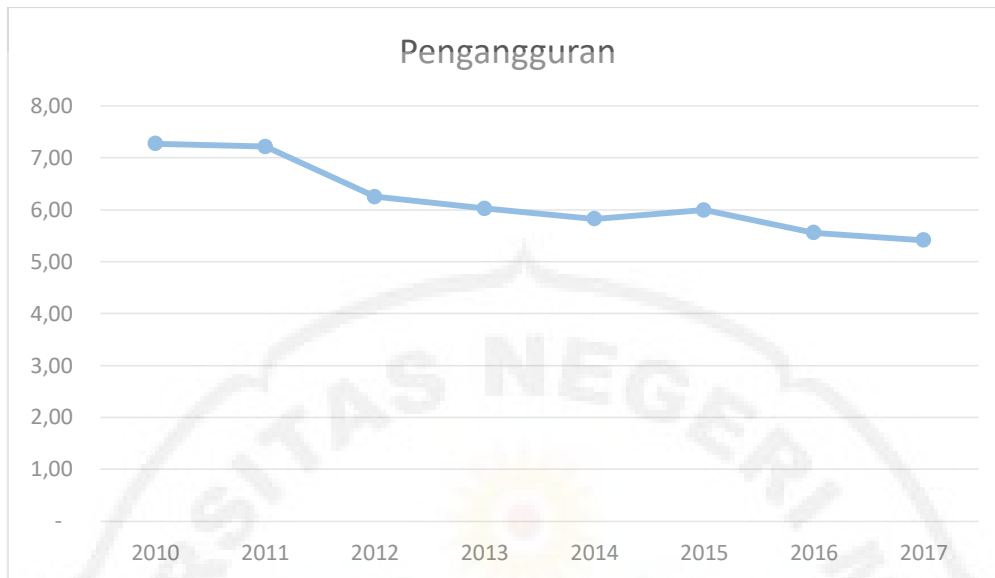
Indonesia. Ternyata perkembangan industry yang *high technology* menuntut sumber daya manusia yang selalu berinovasi, tentu saja tenaga kerja ini dihasilkan dari perguruan-perguruan tinggi dikota.lantas bagaimana dengan nasib masyarakat dipedesaan yang tidak dapat mengakses sarana dan prasarana pendidikan? Kondisi inilah yang mengakibatkan ketimpangan semakin melebar.

Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena kenaikan upah mereka lebih lambat dibanding gaji pekerja terampil, ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).. Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang. (Jatmiko, 2018)

4.2.Tingkat Pengangguran Faktor Penyebab Ketimpangan di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang besar, dimana usia angkatan kerja adalah golongan terbesar dari masyarakatnya, tentu saja membutuhkan lapangan kerja untuk dapat menyerap seluruh angkatan kerjanya. Berikut adalah fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2010-2017





Gambar 4.3. Fluktuasi Tingkat Pengangguran di Indonesia

Dari Gambar 3, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2010-2017. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 7,3 % selanjutnya menurun hingga 5,4% pada tahun 2017. Artinya terjadi penurunan tingkat pengangguran sepanjang sepuluh tahun terakhir. Data ini menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kondisi berbeda jika dibandingkan dengan Gambar 1, yang menjelaskan ketimpangan semakin meningkat sepanjang tahun 2010-2017, artinya tingkat pengangguran yang menurun tidak mampu menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi adalah penyerapan tenaga kerja untuk golongan menengah bawah, dimana golongan ini memiliki pendapatan yang rendah. Sebagian besar masyarakat terjebak dalam golongan ini, misalnya kelompok petani, nelayan, buruh dan pegawai dengan upah dibawah standar upah minimum regional. Dengan tingkat pendapatan yang rendah masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal berbeda terjadi pada golongan kecil masyarakat lainnya. Golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi, sehingga banyak dibutuhkan oleh lapangan kerja, hanya ketersediaannya masih sangat terbatas. Umumnya pihak perusahaan akan membayar para pekerja pada kelompok ini dengan gaji atau upah yang tinggi, sehingga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Golongan ini berasal dari tenaga kerja dengan kualitas pendidikan sarjana atau magister, memiliki ketrampilan tingkat tinggi, kemampuan Informasi Teknologi yang mumpuni. Untuk memenuhi tenaga kerja seperti ini tak jarang perusahaan akan

mengimpor dari luar negeri. Akhirnya ketika hal ini berlangsung terus menerus, maka ketimpangan akan semakin meningkat.

4.3. Dana Alokasi Umum Faktor Penyebab Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dalam perekonomian suatu negara. Banyak factor yang dibutuhkan suatu negara untuk dapat melakukan pertumbuhan negaranya, salah satu diantaranya adalah factor modal. Dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah pemerintah selalu membantu dengan menyalurkan bantuan berupa dana alokasi umum. Tujuan pemeberian dana alokasi umum adalah untuk membantu daerah yang pendapatan bruto masih sedikit, sehingga membutuhkan modal untuk membangun daerahnya.



5. Pembangunan Ekonomi Atau Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional - di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama - untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an – seperti telah disinggung di muka – itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di NSB. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit.

Oleh karena itu, Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999: 3) – pemenang Nobel Ekonomi 1998 - bahwa ‘*development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*’.

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu;
2. usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
3. peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang;
4. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the games*), baik aturan formal maupun informal; dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan GDP atau GNP.

Namun demikian, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2003). Artinya, tujuan pembangunan harus difokuskan kepada tingkat kesejahteraan individu (masyarakat) moril dan material yang disebut dengan istilah depoverisasi (*depauperization*) oleh Adelman (1975). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Namun demikian, ada beberapa ekonom memberikan definisi yang sama untuk kedua istilah tersebut, khususnya Dalam konteks negara maju. Secara umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di NSB.

Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk memperbandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Indikator-indikator tersebut dapat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini dibahas beberapa indikator keberhasilan pembangunan yang dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu: indikator moneter, indikator nonmoneter, dan indikator campuran.

5.1. Indikator Moneter

a. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara.

Beberapa ekonom memandang bahwa pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan suatu negara, karena seperti telah disinggung di muka pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. Namun demikian, meskipun pendekatan pendapatan per kapita ini dianggap memiliki kelemahan yang cukup mendasar sebagai indikator keberhasilan pembangunan, pendekatan ini masih relevan dan sering digunakan serta mudah untuk dipahami. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah karena difokuskan pada esensi pokok (*raison d'etre*) dari pembangunan yaitu meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat serta berkurangnya angka kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah sebuah indikator ukuran (*proxy*) yang buruk dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat.

Pendapatan per kapita juga merupakan salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara-negara lain.

b. Kelemahan Umum Pendekatan Pendapatan per Kapita

Salah satu kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan terletak pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara utuh. Sering kali adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu negara tidak disertai oleh perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Sebenarnya, sudah sejak lama ada keraguan pada konsep pendapatan per kapita sebagai sebuah cerminan dari tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Namun, kita harus tetap menyadari bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, meskipun di samping itu ada beberapa faktor lain (nonekonomi) yang dinilai cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Faktor-faktor nonekonomi - seperti adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, serta ada atau tidaknya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan bertindak merupakan faktor-faktor yang juga dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di negara-negara yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama. Misalnya, apabila penduduk di daerah pegunungan kita asumsikan mempunyai tingkat pendapatan yang relatif sama dengan penduduk yang hidup di daerah dataran rendah. Berdasarkan pada perbedaan kondisi alam dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di daerah dataran rendah adalah lebih tinggi, karena pada umumnya penduduk di daerah dataran rendah menghadapi tantangan alam yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan penduduk di daerah pegunungan. Di daerah dataran rendah, iklimnya tidak terlalu dingin, pekerjaan bertani dan bercocok tanam pun lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkan untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya relatif lebih sedikit.

Ada tidaknya kebebasan dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya kebebasan dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat di suatu negara (misalnya, pada negara-negara yang bersifat otoritarian) menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya selalu dipandang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya.

Selain itu, beberapa ekonom memandang bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subyektif. Artinya, setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda. Dengan demikian memberikan nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Ada sekelompok orang yang lebih menekankan pada akumulasi kekayaan dan tingkat pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai sebuah kepuasan hidup. Tetapi ada pula sekelompok orang yang lebih suka untuk menikmati waktu senggang (*leisure time*) yang lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu pula diingat bahwa pembangunan ekonomi mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan masyarakat, misalnya hilangnya rasa komunalitas sehingga masyarakat menjadi bersifat lebih individualistis, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal, dan sebagainya. Jadi, kadang di satu sisi, pembangunan ekonomi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku dan sikap hidup masyarakat. W. Arthur Lewis (1984) – pemenang Nobel Ekonomi 1979 – mengatakan: "... *like everything else, economic growth has its costs*" yang berarti bahwa pembangunan ekonomi selain memberi manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan sebuah pengorbanan.

c. Kelemahan Metodologis Pendekatan Pendapatan per Kapita

Secara metodologis, pendapatan per kapita sebagai indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar masyarakat ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan itu timbul karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial-budaya, dan perbedaan nilai tukar (kurs) satu mata uang terhadap mata uang yang lain.

Di NSB biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan usia muda relatif lebih tinggi ketimbang di negara-negara maju. Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Misalnya, keluarga Pak Amir terdiri dari 5 anggota keluarga dengan pendapatan US \$1.000 dan keluarga Pak Badu terdiri dari 3 anggota keluarga dengan pendapatan US \$750. Meskipun pendapatan per kapita anggota keluarga Pak Amir lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita anggota keluarga Pak Badu, sangat mungkin keluarga Pak Amir mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga Pak Badu, karena beberapa jenis pengeluaran seperti rekening air dan listrik, perumahan, serta barang-barang lain yang digunakan secara bersama-sama tidak banyak berbeda di antara kedua keluarga tersebut.

Selain tingkat pendapatan, distribusi pendapatan merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering kali kurang diperhatikan dalam perhitungan tingkat pendapatan per kapita, karena asumsi pokok yang digunakan dalam konsep pendapatan per kapita adalah *one dollar, one man*, yang artinya setiap orang memiliki proporsi yang sama atas pembentukan pendapatan per kapita. Berdasarkan pengalaman negara-maju, pada tahap awal pembangunan biasanya kondisi distribusi

pendapatan ini akan memburuk, tetapi pada tahap akhirnya distribusi pendapatan ini semakin baik. Namun demikian, perkembangan di banyak NSB menunjukkan bahwa seiring dengan proses pembangunannya, kondisi distribusi pendapatan sering kali justru semakin buruk.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa NSB, karena usaha-usaha pembangunan dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi belum tercapai sepenuhnya.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda, meskipun tingkat pendapatan per kapitanya relatif sama:

- a. Pola pengeluaran masyarakat. Perbedaan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misalnya, kita asumsikan ada dua orang dengan tingkat pendapatan relatif sama, tetapi salah seorang di antaranya harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi untuk pergi ke tempat kerja, harus berpakaian necis, dan sebagainya, sementara yang satu tidak. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa kedua orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama tingginya.
- b. Perbedaan iklim. Adanya perbedaan iklim juga memungkinkan timbulnya perbedaan pola pengeluaran masyarakat di negara-negara maju dan NSB. Masyarakat di negara maju harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan di NSB. Seperti kita ketahui, sebagian besar negara maju beriklim dingin dan sebagian besar NSB beriklim tropis. Oleh karena itu, penduduk negara-negara maju sering kali harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk dapat menikmati “iklim tropis” seperti yang biasa dinikmati oleh penduduk NSB. Pada musim dingin masyarakat negara maju harus mengeluarkan tambahan pengeluaran yang cukup besar untuk biaya pemanasan (*heater*) di rumahnya, dan biaya pendingin udara (*air-conditioned*) di musim panas.
- c. Struktur produksi nasional. Adanya perbedaan yang mencolok pada komposisi sektoral juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional (pengeluaran) yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan pembentukan modal (2) lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama.

Masih berkaitan dengan metode perhitungan pendapatan nasional, ada anggapan bahwa harga pasar suatu barang mencerminkan nilai sosial dari barang tersebut. Anggapan tersebut tidak selamanya benar karena adanya ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*) sebagai akibat

dari: adanya beberapa hasil produksi yang tidak dipasarkan. Keadaan ini sering kali tampak di wilayah perdesaan, seperti adanya pola pertanian subsisten, di mana masyarakat menanam berbagai macam hasil bumi untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat tingkat pendapatan nasional menjadi lebih rendah dari yang semestinya.

Adanya perbedaan nilai tukar juga mengakibatkan perbandingan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara maju dan NSB selalu timpang sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan jauh lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi di antara kedua kelompok negara tersebut. Sebagai contoh, Usher (1963) mengestimasi bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand adalah 1 : 13,06. Artinya, jumlah pendapatan per kapita Inggris adalah 13,06 kali lebih besar daripada pendapatan per kapita Thailand. Angka perbandingan tersebut didapatkan jika pendapatan nasional Thailand dalam mata uangnya sendiri (baht) dikonversikan terhadap poundsterling pada tingkat kurs yang berlaku. Namun, jika pendapatan per kapita Inggris dan Thailand dinilai secara langsung pada tingkat harga di Thailand maka perbandingan tersebut hanya 1 : 6,27, dan jika pendapatan per kapita antara kedua negara tersebut dinilai pada tingkat harga di Inggris maka perbandingan tersebut akan turun menjadi 1 : 2,76.

Sementara itu, pada awal dekade 1950-an, Millikan (1950) dalam Balassa (1961) juga mengestimasi tingkat pendapatan per kapita negara-negara di kawasan Asia (kecuali Timur Tengah). Menurut perhitungan konvensional, pendapatan per kapita negara-negara di kawasan tersebut adalah US \$58, namun menurut hasil estimasi Millikan, pendapatan per kapita dari negara-negara di kawasan tersebut mencapai US \$195. Untuk negara-negara di kawasan Afrika menurut perhitungan konvensional nilai pendapatan per kapita mereka adalah US \$48, tetapi setelah dilakukan estimasi ulang ternyata nilai sebenarnya adalah US \$117. Sebagai bahan pembandingan, dari studi yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis (1956) diperoleh temuan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di beberapa negara maju ternyata lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita mereka.

Kesalahan dalam mengestimasi tingkat pendapatan per kapita di NSB disebabkan oleh adanya “ketidaktepatan” dalam metode penghitungan pendapatan per kapita. Ketidaktepatan tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. adanya masalah dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Selama ini jenis-jenis kegiatan yang dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional adalah setiap kegiatan hasilnya dijual ke pasar. Hal ini berarti pemilik faktor produksi memperoleh balas jasa atas kegiatannya tersebut. Padahal di NSB banyak sekali kegiatan produktif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan

- pendapatan nasional yang seharusnya dapat dinilai misalnya mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan di rumah;
- b. Adanya kesulitan dalam mengonversi nilai pendapatan per kapita dari mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya. Biasanya nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan negara lain tidak mencerminkan perbandingan tingkat harga di kedua negara tersebut. Misalnya, kita asumsikan nilai tukar resmi antara mata uang negara kita (rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat adalah 1 US \$ = Rp10.000. Secara teoritis, hal ini berarti harga sebuah barang yang ada di Amerika Serikat apabila dikalikan dengan Rp 10.000 maka harus sama nilainya dengan barang yang sama di Indonesia. Namun kenyataannya, nilai (harga) barang tersebut di Indonesia bisa lebih kecil atau malah lebih besar dari nilai (harga) yang seharusnya secara teoritis.

5.2. Indikator Non Moneter (Indikator Sosial)

Beckerman dalam *International Comparisons of Real Incomes* (1966) mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam tiga kelompok: (1) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis (1956), (2) kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara, dan (3) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (*nonmonetary indicators*), seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrifikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.

Menurut Beckerman (1966), dari berbagai metode di atas, metode yang digunakan oleh Gilbert & Kravis (1956) adalah metode yang paling sempurna. Pada metode ini, dilakukan perbaikan pada metode perhitungan pendapatan konvensional dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Dengan studinya, mereka membandingkan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Mereka melakukan perhitungan kembali pada pendapatan nasional negara-negara di kawasan Eropa berdasarkan atas tingkat harga di Amerika Serikat. Dengan kata lain, nilai produksi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat di nilai dengan tingkat harga yang sama. Kesimpulan dari studi yang dilakukan Gilbert & Kravis (1956) adalah bahwa perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara penduduk negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat

tidaklah sebesar seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan per kapita mereka yang dihitung menurut metode konvensional.

Namun, metode ini memerlukan data yang lengkap dan sering kali data yang diperlukan dalam estimasi tidak tersedia di NSB. Oleh karena itu, Beckerman (1966) mengemukakan metode lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter. Metode ini dinamakan *Indikator Nonmoneter yang Disederhanakan (modified non-monetary indicators)*.

Menurut metode ini, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB. Data tersebut adalah:

- a. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg).
- b. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton).
- c. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
- d. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.
- e. Jumlah persediaan telepon dikalikan 10.
- f. Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
- g. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara dilakukan pula oleh *United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)*, sebuah badan PBB yang berpusat di Jenewa pada tahun 1970. Dalam studinya, UNSRID (1970) menggunakan 18 indikator yang terdiri dari 10 indikator ekonomi dan 8 indikator sosial yaitu:

- a. Tingkat harapan hidup.
- b. Konsumsi protein hewani per kapita.
- c. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
- d. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.
- e. Jumlah surat kabar.
- f. Jumlah telepon.
- g. Jumlah radio.
- h. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.
- i. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.
- j. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi.
- k. Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji atau upah.
- l. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri manufaktur.

- m. Konsumsi energi per kapita.
- n. Konsumsi listrik per kapita.
- o. Konsumsi baja per kapita.
- p. Nilai per kapita perdagangan luar negeri.
- q. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.
- r. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan maka dapat dipastikan perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Hasil studi UNSRID menyebutkan bahwa dari 58 negara yang dihitung indeks pembangunannya, Thailand merupakan negara dengan indeks paling rendah (10), sementara indeks pembangunan Inggris adalah 104. Oleh karena itu, secara relatif dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan Inggris 10 kali lebih besar dari Thailand. Nilai tersebut jelas lebih kecil dari perbandingan pendapatan per kapita kedua negara tersebut. Hasil studi Usher (1963) seperti telah disinggung sebelumnya menyebutkan bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand dengan cara konvensional menghasilkan angka 1 : 13,06. Artinya, pendapatan Inggris adalah 13,06 kali pendapatan per kapita Thailand.

Di antara negara-negara maju, perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan oleh indeks pembangunan sering kali lebih kecil dibandingkan jika menggunakan tolok ukur pendapatan per kapita mereka. Misalnya, pada tahun 1970, perbandingan pendapatan per kapita Belanda dan Swedia adalah US \$965 dan US \$1,696, sebuah perbedaan yang sangat besar. Sedangkan perbandingan indeks pembangunan mereka menunjukkan bahwa tingkat pembangunan yang dicapai kedua negara tersebut tidak banyak berbeda yaitu 96 : 103. Kesimpulan yang diperoleh dari studi UNSRID adalah bahwa di banyak negara, pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan ekonominya.

a.. Indeks Kualitas Hidup

Pada tahun 1979, Morris D. Morris memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality of Life Index*. Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas

atas (*upper limit*) 100 ditetapkan 77 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh Swedia). Sedangkan batas bawah (*lower limit*) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1.000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973), sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1.000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon).

5.3. Indikator Campuran

a. Indikator Susenas Inti

Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut Indikator Susenas Inti (*Core Susenas*). Indikator Susenas Inti ini merupakan indikator "campuran" karena terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator Susenas Inti ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Pendidikan, dengan indikator: tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.
- b. Kesehatan, dengan indikator: rata-rata hari sakit dan fasilitas kesehatan yang tersedia.
- c. Perumahan, dengan indikator: sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan kualitas tempat tinggal.
- d. Angkatan Kerja, dengan indikator: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.
- e. Keluarga Berencana dan Fertilitas, dengan indikator: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.
- f. Ekonomi, dengan indikator: tingkat konsumsi per kapita.
- g. Kriminalitas, dengan indikator: angka kriminalitas per tahun.
- h. Perjalanan wisata, dengan indikator: frekuensi perjalanan wisata per tahun.
- i. Akses ke media massa, dengan indikator: jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990, *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli.

Sama seperti IKH, IPM ini juga digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan berbagai negara di dunia. Berdasarkan indeks IPM-nya, negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50.
- b. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai 0,79.
- c. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.

Sistem desentralisasi di Indonesia amat berperan dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas secara efektif jika ingin semua orang menikmati peluang yang sama. Sejak diterapkannya demokratisasi dan desentralisasi, kekuatan finansial, politik dan tanggung jawab pemerintah daerah meningkat drastis. Saat ini sebagian besar wewenang atas pelayanan dasar yang memberi peluang untuk awal hidup yang baik, seperti kesehatan, air dan sanitasi, nutrisi dan keluarga berencana, dikendalikan atau dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Banyak hal harus dilakukan agar mereka memiliki sarana, kapasitas dan insentif untuk menyediakan atau mendukung layanan tersebut secara efektif.

Sejumlah kebijakan utama dapat mendukung perbaikan aspek pelayanan publik di daerah. Membangun kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dengan menerapkan sistem transfer yang lebih berbasis kinerja dan menyediakan instrumen bagi warga untuk mengawasi pelayanan publik setempat. Sejumlah prioritas lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah termasuk: mengubah cara alokasi anggaran belanja pusat, menerapkan insentif untuk mencapai standar pelayanan publik di daerah, dan meningkatkan permintaan akuntabilitas publik. Kita akan melihat bagaimana hal ini dapat dicapai khususnya dalam kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana.

Salah satu langkah terpenting dalam mengatasi ketimpangan peluang dimulai dengan meningkatkan akses rumah tangga miskin pada pelayanan kesehatan berkualitas. Agar anak dari rumah tangga miskin mendapatkan awal yang baik mereka harus memperoleh akses pelayanan kesehatan berkualitas di tahap tumbuh kembang usia dini. Bila tidak, mereka akan berada dalam posisi kurang beruntung sepanjang sisa hidup mereka. Peningkatan anggaran belanja untuk kesehatan dapat membantu mengurangi kesenjangan akses. Namun, memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Tindakan spesifik antara lain:

1. Meningkatkan pembiayaan kesehatan. Dengan investasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bertarget dan insentif yang tepat, agar fasilitas kesehatan di daerah dapat membuahkan hasil. Pertama, kenaikan anggaran kesehatan masyarakat belum lama ini harus dipertahankan. Anggaran kesehatan Indonesia terhadap rasio PDB adalah yang kelima terendah dari 188 negara, yaitu hanya 1,2 persen dari PDB pada tahun 2014 (termasuk anggaran untuk sistem jaminan sosial kesehatan nasional), sebelum diumumkan kenaikan dalam anggaran 2016. Namun anggaran kesehatan masyarakat juga dapat ditingkatkan dengan cara membuat pemerintah daerah lebih akuntabel dan mampu menyediakan pelayanan kesehatan di lapangan. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan investasi DAK (Dana Alokasi Khusus) bertarget yang digabung dengan insentif untuk membuahkan hasil. Contohnya, besarnya DAK untuk pemerintah kabupaten/kota dapat dikaitkan dengan indikator ketertinggalan pelayanan kesehatan terhadap standar dasar, contohnya kesehatan ibu dan anak. Kontribusi pemerintah kabupaten/kota dapat diganti oleh pusat apabila ada bukti penyediaan layanan. Seterusnya, alokasi DAK dapat juga memperhitungkan kemajuan dalam indikator tersebut. Kabupaten/kota yang kinerjanya kurang bisa dibantu, apabila terbukti masalahnya adalah kekurangan kapasitas.
2. Menghasilkan tenaga kesehatan kompeten dalam jumlah memadai dan memastikan cukup banyak dari mereka disalurkan ke daerah tertinggal. Ada beberapa cara untuk meningkatkan jumlah, kualitas dan penyaluran tenaga kesehatan. Menghasilkan jumlah yang tepat dimulai dengan lebih memahami dinamika tenaga kesehatan di tingkat nasional dan subnasional, dengan menggunakan metode perencanaan modern untuk menghasilkan dan menyalurkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan riil, dan lebih melibatkan sektor swasta. Kualitas dapat ditingkatkan dengan membatasi rekrutmen pegawai negeri sipil pada mereka yang sudah mendapat sertifikasi menurut standar nasional dan membatasi pemberian pelayanan untuk pasien dengan asuransi kesehatan pada pelayanan yang sudah disediakan tenaga kesehatan bersertifikasi baik di sektor publik maupun swasta. Memperbaiki sistem sertifikasi, akreditasi dan perizinan pendidikan tenaga kesehatan dan tenaga medis profesional. Terakhir, agar bisa mengerahkan cukup banyak tenaga kesehatan berkualifikasi ke daerah tertinggal diperlukan penekanan sektor publik pada penempatan dokter di daerah pedesaan yang kekurangan pelayanan kesehatan. Meningkatkan penggunaan uang rakyat secara efisien dan mencoba insentif berbeda dari yang digunakan sampai saat ini untuk mendorong tenaga kesehatan agar bersedia bekerja di daerah terpencil. Contohnya, alih-alih memberi insentif keuangan untuk menarik tenaga kesehatan ke daerah pedesaan dan terpencil, bisa saja semua dokter diwajibkan bekerja selama beberapa waktu di daerah tersebut demi

mendapatkan akreditasi nasional, seperti yang diwajibkan di Australia, atau pemberian beasiswa pemerintah untuk tenaga medis profesional dengan syarat wajib bekerja selama satu atau dua tahun di daerah tertinggal.

Menciptakan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sanitasi melalui penguatan tenaga kesehatan masyarakat (kader Posyandu). Kebutuhan dan pengetahuan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak serta air dan sanitasi dapat ditingkatkan melalui: pendidikan, dukungan dan tekanan sosial, dan insentif, termasuk sosialisasi yang lebih baik tentang pentingnya perilaku sehat; penjangkauan dari pejabat kesehatan setempat, tokoh masyarakat terpercaya dan LSM; serta insentif melalui bantuan langsung tunai bersyarat seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau program bantuan sosial lainnya. Peningkatan profesionalisasi kader Posyandu khususnya penting dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan, insentif berbasis kinerja, dan pengawasan ketat dari Puskesmas. Para kader tersebut harus turun langsung ke masyarakat untuk memastikan ibu hamil menerima perawatan prakelahiran secara rutin, ibu membawa anak mereka untuk diimunisasi, dan tindakan dasar lainnya untuk mengurangi ancaman penyakit sekaligus tingginya biaya perawatan yang terlambat. Sehubungan dengan kurangnya tinggi badan dan nutrisi, kader Posyandu dapat memainkan peran utama dalam Komunikasi Perubahan Perilaku yang efektif, terutama lewat konseling pribadi yang menitikberatkan pada praktik perawatan kesehatan ibu yang lebih baik dan perilaku pemberian makanan untuk bayi dan anak kecil. Seperti telah ditunjukkan di negaranegara lain, kuncinya adalah kunjungan ke rumah secara teratur untuk memberikan dukungan yang disesuaikan bagi setiap ibu. Percontohan pelatihan Posyandu di bawah PNPM Generasi juga dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Kesenjangan akses untuk bersekolah perlahan mulai berkurang, tapi tetap harus diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan agar dapat mengurangi ketimpangan. Kesenjangan angka partisipasi sekolah antara orang kaya dan miskin telah berkurang seiring waktu, namun kontribusi ketimpangan peluang pada ketimpangan secara keseluruhan belum menurun karena kesenjangan kualitas terus terjadi. Ini juga faktor penting yang menghambat kenaikan pertumbuhan ekonomi. Mendorong semua anak untuk tetap bersekolah setidaknya sampai selesai sekolah menengah atas merupakan langkah penting.

Artinya pemerintah perlu meningkatkan akses di daerah tertentu, meningkatkan pentargetan, cakupan, tingkat manfaat dan penyerapan beasiswa untuk rumah tangga miskin di semua daerah serta pemberian insentif bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Namun, ketimpangan peluang dapat berkurang lebih jauh dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat, jika kesenjangan kualitas diatasi (manfaat dalam hal pertumbuhan

untuk Indonesia diperkirakan sekitar tujuh kali lebih tinggi jika kesenjangan kualitas dikurangi, dibandingkan jika kesenjangan akses dikurangi). Mungkin diperlukan manajemen sekolah yang menyeluruh dan reformasi pendidikan seperti yang berhasil dilakukan di negara lain, dan mencari jawaban mengapa penerapan reformasi semacam ini di Indonesia masih tersendat. Ada beberapa tindakan spesifik yang dapat membantu, antara lain:

Memastikan pembiayaan sekolah yang cukup, khususnya di daerah tertinggal, untuk mencapai standar kualitas minimum. Sebuah laporan Bank Dunia baru-baru ini mengidentifikasi beberapa opsi untuk memperbaiki BOS (Bantuan Operasional Sekolah), antara lain: (i) mengaitkan pendanaan lebih langsung pada standar pendidikan untuk menandakan pentingnya menggunakan sumber daya BOS untuk memenuhi standar tersebut; (ii) merevisi daftar hal-hal yang dapat dibiayai dengan BOS agar sekolah dapat lebih luwes berinvestasi sesuai masukan yang meningkatkan kualitas; (iii) menyesuaikan nilai BOS secara berkala untuk memperhitungkan perbedaan harga secara regional dan inflasi agar memastikan semua sekolah dapat memenuhi standar operasi; (iv) menggunakan formula BOS untuk memberi lebih banyak pendanaan bagi sekolah yang melayani anak miskin dan kurang beruntung; dan (v) mulai mengurangi penggunaan sumber daya BOS untuk pengeluaran 'di luar kantong' siswa miskin dan lebih mengutamakan program bertarget yang sudah ada, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar). Pemerintah daerah sekaligus didorong menggunakan dukungan operasional mereka untuk sekolah yang melengkapi BOS (Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA). BOS memungkinkan sekolah memenuhi standar pelayanan minimum sedangkan BOSDA memungkinkan sekolah memenuhi standar pendidikan nasional yang lebih tinggi. Reformasi di DKI Jakarta baru-baru ini memberikan suatu contoh pendekatan potensial, dengan menggabungkan komponen ekuitas (alih-alih pengeluaran merata per orang, sekolah-sekolah di Kepulauan Seribu menerima lebih banyak dana karena biaya penyediaan pelayanan yang lebih tinggi) dan komponen insentif (sekolah-sekolah dengan nilai Ujian Nasional tertinggi dan kenaikan nilai Ujian Nasional tertinggi menerima alokasi tambahan pada tahun berikutnya). Selain itu, investasi DAK bertarget dan berbasis kinerja yang diusulkan di bidang kesehatan juga bisa diterapkan di bidang pendidikan berdasarkan kesenjangan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.

Meningkatkan kompetensi guru di semua daerah, dan memastikan kecukupan penyalurannya ke daerah tertinggal. Strategi yang bisa digunakan antara lain: (i) seleksi masuk dan keluar yang lebih ketat (melalui penggunaan tes kompetensi) dan akreditasi institusional untuk memastikan tersedianya guru kompeten; (ii) rekrutmen dan penyaluran guru kompeten, khususnya di daerah tertinggal, dengan menggabungkan insentif keuangan, skema bonding

dan penempatan berbasis kelompok; (iii) pengembangan dan dukungan profesional yang lebih kuat; dan (iv) akuntabilitas guru yang lebih tinggi, seperti melalui penggunaan penilaian dan tes kompetensi tahunan untuk menentukan kemajuan karir, dan mengaitkan pembaruan kontrak dengan kinerja.

Dengan strategi tepat sasaran, pemerintah dapat memberikan keluarga miskin akses yang adil pada pelayanan keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah anggota keluarga. Selain karena urbanisasi dan kenaikan angka partisipasi sekolah, jumlah anggota keluarga akan berkurang saat pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berlanjut. Namun dibutuhkan usaha untuk menargetkan rumah tangga miskin supaya mereka tidak tertinggal karena terlalu banyak anak. Caranya dengan mengurangi ketimpangan dalam pengetahuan, penggunaan, akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, sekaligus memastikan bahwa keluarga berencana dianggap sebagai hak yang sangat penting. Sektor swasta digunakan oleh 73 persen peserta keluarga berencana di Indonesia, maka kemampuan swasta untuk menyediakan pelayanan efektif bagi sebagian besar rakyat Indonesia harus diperkuat, bukan dilemahkan. Namun, kecil kemungkinan sektor swasta cukup menjangkau semua rumah tangga miskin karena sulit dan mahal untuk menjangkau kelompok miskin dan termarginalkan. Maka, usaha lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan untuk merevitalisasi program keluarga berencana, dengan strategi menargetkan mereka yang paling membutuhkan. Tindakan spesifik antara lain:

Mensosialisasikan konsep keluarga berencana sebagai hak bagi semua orang. Salah satu penyebab berbaliknya tren kelahiran anak adalah meningkatnya angka kehamilan remaja. Ini sebagian disebabkan tekanan sosial terhadap pemberian kontrasepsi untuk remaja dan orang yang belum menikah. Kenaikan angka pernikahan dini juga mengakibatkan kelahiran anak lebih cepat dan keluarga lebih besar. Sangat penting untuk memastikan semua orang punya akses pada keluarga berencana.

Membantu sektor swasta untuk memberikan pelayanan keluarga berencana yang efektif, sementara program pemerintah menutupi kesenjangan dalam hal cakupan. Karena sebagian besar orang Indonesia menggunakan pelayanan keluarga berencana swasta, maka kemampuan sektor swasta harus diperkuat. Perbaikan infrastruktur dan logistik akan memperluas jangkauan sektor swasta ke daerah terpencil yang sampai sekarang kurang terlayani sehingga mengurangi penyediaan pelayanan publik. Pemerintah juga harus mencari cara mendorong pelayanan sektor swasta untuk kembali menggunakan metode jangka panjang dan permanen bagi keluarga yang sudah mencapai ukuran ideal. Metode semacam ini lebih efektif daripada metode jangka pendek. Saat ini, inisiatif untuk mengkriminalisasi penyediaan alat kontrasepsi oleh swasta,

memperparah tren kelahiran anak. Rumah tangga miskin tidak mampu mengakses pelayanan sektor swasta, sementara pendanaan program keluarga berencana pemerintah sangat minim. Perjanjian di tingkat pusat antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri (yang menangani permasalahan pemerintah daerah) tentang pendanaan keluarga berencana amatlah penting karena anggaran keluarga berencana kini adalah hak prerogatif daerah pelayanan keluarga berencana; menggalakkan penggunaan kontrasepsi oleh pasangan dari kelompok miskin dan termarginalkan dalam merencanakan keluarga mereka. Diperlukan lebih banyak usaha untuk menangani kebutuhan kontrasepsi pasangan dari keluarga kurang beruntung yang belum terpenuhi, termasuk melalui sosial `isasi; pemberian layanan kontrasepsi terjangkau bagi rumah tangga miskin; dan peningkatan jumlah bidan yang memiliki kualifikasi untuk memasang IUD dan implan.

Meningkatkan keterampilan pekerja masa kini dan memberikan mereka akses lebih besar pada lapangan kerja produktif

Dalam jangka pendek, lebih banyak hal bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pekerja saat ini dan menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dengan mengatasi penghalang dan kendala pertumbuhan produktivitas, khususnya melalui infrastruktur yang lebih baik dan daya saing yang lebih tinggi. Salah satu aspek terpenting pembaruan adalah memperbaiki infrastruktur, konektivitas, dan logistik, yang dibahas secara mendetail di bagian berikutnya. Di luar itu, peringkat Indonesia dalam indeks Kemudahan Menjalankan Bisnis harus terus ditingkatkan, selain juga akses pembiayaan untuk usaha kecil yang ingin memperluas bisnis. Sektor manufaktur maupun pertanian dapat menyerap pekerjaan produktif dan semiterampil untuk pekerja miskin dan rentan, sehingga revitalisasi kedua sektor tersebut sangat diperlukan.

Indonesia dapat pula menerapkan "Grand Bargain" antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk meninjau ulang peraturan pasar tenaga kerja dan memberi perlindungan lebih efektif kepada pekerja. Peraturan pasar dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu yang paling kaku secara regional dan menghalangi penciptaan lapangan kerja formal namun justru memiliki perlindungan de facto yang rendah. Reformasi peraturan dan program tertentu secara sedikit demi sedikit sulit dilakukan karena jika ada perubahan dalam hubungan industri, keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain. Karena alasan inilah barangkali dibutuhkan Grand Bargain untuk melaksanakan reformasi menyeluruh yang dinilai menguntungkan bagi pengusaha, serikat pekerja, maupun pencari kerja.

Reformasi sistem pelatihan keterampilan nasional juga memungkinkan pekerja meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan pekerjaan lebih baik. Pemberian insentif kepada pengusaha untuk pelatihan berbasis kebutuhan dan berorientasi hasil, idealnya bermitra dengan penyedia pelatihan, sehingga dapat menghasilkan taraf keterlibatan sektor swasta yang lebih tinggi. Menyesuaikan tingkat subsidi dengan jenis pekerja yang dilatih dapat mengatasi ketimpangan, misalnya perempuan, anak muda dan orang yang hidup dengan disabilitas. Kemitraan dengan sektor swasta dalam pengadaan dan pembiayaan pelatihan, akan membuat pemerintah lebih leluasa mengalokasikan dana untuk memperluas sistem pelatihan ke semua provinsi dan daerah tertinggal.

5.4. Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengatasi ketimpangan saat ini dan di masa depan.

Fokus pada kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi ketimpangan peluang dan menyediakan pekerjaan yang lebih baik dalam jangka panjang dibutuhkan anggaran belanja pemerintah lewat kebijakan prioritas seperti: peningkatan anggaran kesehatan dan kelanjutan pendanaan pendidikan, investasi lebih besar pada infrastruktur, dan peningkatan cakupan bantuan sosial, manfaat dan jaminan sosial untuk semua orang. Menyelaraskan anggaran pemerintah di balik prioritas tersebut adalah satu peran utama yang dapat dimainkan kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan jangka panjang karena faktor-faktor di luar kendali individu.

Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan dalam jangka pendek walaupun secara umum belum dipraktikkan di Indonesia, Banyak tindakan kebijakan yang dibahas hanya berdampak pada ketimpangan jangka panjang, seperti perbaikan kesehatan dan nutrisi anak, kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan lingkungan yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Namun, rancangan kebijakan fiskal keseluruhan juga dapat berdampak pada ketimpangan jangka pendek melalui beberapa cara. Saat ini, pendapatan rumah tangga yang berbeda dapat terkena dampak lewat berbagai cara: pilihan pajak, bantuan langsung, subsidi dan bantuan jasa oleh Pemerintah.

Di sejumlah negara, rasio Gini menurun secara drastis setelah memperhitungkan kebijakan fiskal. Contohnya, rasio Gini Brasil 14 poin lebih rendah setelah memperhitungkan semua pajak dan belanja pemerintah, dibandingkan rasio Gini yang hanya berdasarkan pendapatan pasar. Namun, di Indonesia perubahan bersih pendapatan rumah tangga dari pajak dan bantuan langsung nyaris tidak mengubah rasio Gini. Contohnya, saat mengikutsertakan belanja

kesehatan dan pendidikan berupa barang atau jasa, rasio Gini hanya turun dua poin. Untuk menyetarakan kebijakan fiskal demi mendorong pemberantasan ketimpangan dibutuhkan:

1. Belanja negara di bidang yang tepat: bantuan sosial, kesehatan dan infrastruktur. Hal utama yang dapat mengurangi ketimpangan adalah alokasi belanja negara yang tepat. Indonesia sejak dulu telah menghabiskan banyak biaya untuk kebijakan yang dampaknya paling kecil untuk mengurangi ketimpangan, seperti subsidi, dan sedikit biaya untuk kebijakan yang memberi efek paling besar, contohnya program bantuan sosial seperti PKH (sejenis bantuan tunai bersyarat), BSM (sekarang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yaitu program beasiswa untuk murid miskin), dan kesehatan. Padahal penting untuk mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih adil semacam ini. Belanja negara dapat dibuat lebih pro-rakyat miskin. Anggaran pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial saat ini tidak mengurangi ketimpangan sebanyak anggaran di negara-negara lain. Sebagian besar kenaikan anggaran kesehatan yang diusulkan untuk tahun 2016 dimaksudkan untuk sistem asuransi kesehatan nasional (Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN) yang cenderung berpihak ke rumah sakit besar di kota-kota besar dan menguntungkan rumah tangga yang lebih mapan, padahal jangkauan anggaran peningkatan pelayanan kesehatan primer akan lebih pro-rakyat miskin.
2. Infrastruktur merupakan kunci penting pendukung kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pada semua aspek lainnya. Rencana alokasi ulang subsidi BBM untuk investasilebih besar pada infrastruktur juga sangat penting. Anggaran belanja infrastruktur dapat meningkatkan akses pada pelayanan publik. Seperempat populasi Indonesia berada di perkotaan dan lebih dari separuh penduduk pedesaan kurang memiliki akses transportasi. Manfaat perbaikan transportasi berlipat ganda: meningkatkan akses pada pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan.

Selain itu, akan mengurangi biaya transportasi sehingga meningkatkan konektivitas dan produktivitas. Masalah transportasi adalah kendala besar bagi industri manufaktur. Mengurangi kendala ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing, membantu menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, serta mendekatkan produsen lokal bahan mentah ke pasar domestik Contohnya, saat ini lebih murah mengimpor jeruk dari Tiongkok daripada mendapatkannya dari Kalimantan. Peningkatan konektivitas untuk daerah terpencil dan penurunan biaya logistik akan membantu menurunkan harga beras maupun bahan pokok lainnya yang sangat memengaruhi rakyat miskin. Terakhir, Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari 1 poin persentase pertumbuhan PDB tambahan per tahun karena kurangnya investasi pada infrastruktur, khususnya transportasi. Dengan menghilangkan kendala ini, maka serapan tenaga kerja akan lebih banyak, pendapatan dan

konsumsi rumah tangga meningkat. Artinya, sumber daya fiskal untuk belanja pemerintah pada program sosial pun meningkat, yang akhirnya akan membantu menciptakan situasi adil bagi setiap orang.

3. Meski kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan, hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pertumbuhan anggaran belanja tidak boleh melebihi pertumbuhan pendapatan. Ketika biaya untuk distribusi ulang dan anggaran sosial lainnya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka kerangka fiskal akan sulit dipertahankan. Indonesia mampu mengalokasikan lebih banyak dana untuk anggaran sosial, tetapi penambahan anggaran tidak boleh didasarkan pada peningkatan pendapatan negara yang tidak realistis. Risiko ini berlaku untuk anggaran 2015 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-19. Dibutuhkan reformasi signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika diasumsikan keadaan tetap seperti saat ini, tanpa reformasi signifikan pada kebijakan pendapatan atau administrasi, maka pendapatan dasar untuk 2015-19 diproyeksikan tetap stabil di antara 13,3 sampai 13,5 persen dari PDB. Jika tidak dibatasi secara hukum untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3,0 persen dari PDB (ini disebut aturan fiskal), berarti defisit akan mencapai 4,6 persen dari PDB pada 2015, dan naik sampai 6,0 persen dari PDB pada 2019. Tanpa skema ruang fiskal tambahan, Pemerintah harus mengurangi secara drastis peningkatan anggaran belanja yang direncanakan (dan diperlukan) untuk prioritas pembangunan dan ketimpangan.
4. Kebijakan mencampurkan pendapatan yang digunakan untuk mencapai kesinambungan fiskal juga dapat memengaruhi ketimpangan saat ini. Pemerintah bisa membiayai anggaran belanja untuk memberantas ketimpangan dengan beberapa cara. Namun perlu dipertimbangkan siapa yang membayar pajak dan pendapatan nonpajak, serta bagaimana ini berdampak pada ketimpangan. Ada pendekatan yang menghasilkan pendapatan sekaligus menanggulangi ketimpangan untuk pajak tidak langsung seperti: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak barang mewah, pajak penghasilan pribadi dan badan, serta pendapatan nonpajak dari sumber daya.

5. Kesimpulan

Factor penyebab terjadinya ketimpangan yang diukur dengan indeks Williamson antar provinsi di Indonesia adalah variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan dana alokasi umum

1. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat pengangguran berpengaruh negative sebesar - 0,015 terhadap Tingkat Ketimpangan (Indeks Williamson) di Indonesia, dan signifikan karena nilai probability sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya peningkatan tingkat pengangguran akan menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika IPM meningkat maka tingkat ketimpangan di Indonesia juga meningkat. Sedangkan nilai probailiti $0,0012 < 0,05$.

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif sebesar 0,0053 terhadap Tingkat Ketimpangan (Indeks Williamson) di Indonesia, dan signifikan karena nilai probability sebesar $0,0000 < 0,05$. Artinya peningkatan Dana ALokasi Umum akan meningkatkan tingkat ketimpangan di Indonesia.
3. Model Ketimpangan di Sumatera Utara yang terbentuk adalah $LOG(IW) = -0,628 - 0,015 LOG(\text{Tingkat Pengangguran}) + 0,217 LOG(IPM) + 0,053 LOG(DAU)$. Menurunnya jumlah pengangguran tidak mampu menurunkan tingkat ketimpangan, karena tenaga kerja yang diserap adalah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dasar dengan pendapatan yang rendah, akhirnya distribusi pendapatan masih belum merata.
4. Dari segi kuantitas, angkatan kerja di Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang semakin meningkat, tetapi tingkat ketimpangan juga masih tinggi, karena penumpukan SDM didaerah perkotaan dan pusat pemerintahan, sehingga distribusi SDM yang berkualitas belum merata.
5. Penyaluran Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, belum optimal dimanfaatkan, sehingga belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia.
6. Meningkatnya ketimpangan akhir-akhir ini telah menimbulkan keprihatinan di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia. Kertas kerja ini memaparkan upaya untuk mencari bukti empiris mengenai dampak ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

dalam konteks Indonesia. Setelah KKA pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan yang signifikan dan terus berlanjut. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan angka ketimpangan di Indonesia yang relatif stabil pada tiga dekade pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebelum krisis.

7. Hasil analisis kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Namun, ukuran-ukuran ketimpangan yang berbeda berhubungan dengan setiap ukuran hasil (*outcome*) yang berbeda pula. Secara keseluruhan, temuan kami mengindikasikan bahwa ketimpangan konsumsi memengaruhi pertumbuhan, sedangkan ketimpangan pendidikan kelihatannya lebih penting untuk tingkat pengangguran. Secara umum, dampak ketimpangan bersifat nonlinier dalam bentuk kurva U terbalik untuk pertumbuhan dan berbentuk kurva U untuk pengangguran. Sama dengan temuan di atas, ketimpangan horizontal antarkelompok etnis juga memiliki hubungan nonlinier berbentuk kurva U terbalik dengan pertumbuhan. Sementara itu, ketimpangan horizontal antarkelompok agama memiliki hubungan nonlinier berbentuk kurva U dengan pengangguran.
8. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kita harus menangani masalah ketimpangan dengan sangat hati-hati. Ketimpangan pada awalnya mungkin tidak berpengaruh buruk terhadap tingkat pertumbuhan dan ketenagakerjaan, tetapi setelah melewati ambang batas tertentu, ketimpangan akan berpengaruh negatif. Hal ini menyiratkan pentingnya penerapan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah meningkatnya ketimpangan dan mengurangi dampak buruknya.
9. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan sesegera mungkin dan dampaknya dapat langsung dirasakan. Tindakan perbaikan membutuhkan waktu agar efeknya mulai terasa. Artinya aksi penanggulangan ketimpangan harus dimulai sekarang. Caranya dengan memanfaatkan kemauan politik yang ada dan dukungan masyarakat (88 persen orang Indonesia yang disurvei mengatakan mengatasi ketimpangan adalah hal yang "sangat mendesak" atau "cukup mendesak"). Menunda-nunda bisa berbahaya. Ini melihat banyaknya warga Indonesia yang lebih kaya yang memilih untuk tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan pemerintah, sehingga berisiko berkurangnya desakan kuat kepada pemerintah untuk menyediakan dan mengalokasikan anggaran pajak yang lebih tinggi dan adil bagi pelayanan publik yang lebih baik.
10. Mengatasi ketimpangan sebagian besar merupakan usaha jangka panjang yang membutuhkan komitmen kebijakan jangka panjang pula. Ketimpangan secara umum berubah perlahan-lahan seiring waktu, maka penurunan pesat dalam jangka pendek tidaklah

mungkin. Sejumlah kebijakan utama untuk mengatasi ketimpangan, seperti peluang yang lebih merata bagi anak-anak saat ini untuk memperoleh kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, akan membutuhkan satu generasi untuk membuahkan hasil. Walau demikian, mengatasi ketimpangan tidak bisa dilakukan tanpa memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi, yang merupakan tujuan kebijakan yang mendapat dukungan luas. Untuk melakukan ini kesetaraan peluang harus diusahakan secepat mungkin yang tentu saja akan membutuhkan pengumpulan pendapatan negara yang lebih tinggi, pengalihan anggaran belanja negara, yang berujung pada pentargetan dan penyediaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Menghadapi ketimpangan secara luas merupakan permasalahan jangka panjang. Ketimpangan secara umum berubah perlahan sepanjang waktu, perubahan yang sangat cepat dalam jangka pendek adalah tidak mungkin. Beberapa kebijakan kunci untuk menghadapi ketimpangan, seperti kesempatan yang sama di sektor kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak saat ini dikombinasikan dengan pekerjaan lebih baik di masa mendatang, akan membutuhkan satu generasi untuk merasakan manfaatnya. Menjadi penting untuk memulai dari sekarang. Langkah perbaikan membutuhkan waktu, yang berarti harus dimulai dari sekarang. Memulai dari sekarang juga dapat menguntungkan secara politik untuk menyelesaikan ketidaksetaraan sebagai bentuk dukungan dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi, terdapat bahaya apabila ditunda. Dengan banyaknya orang Indonesia menolak program layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan layanan lainnya, maka terdapat potensi bahaya mereka tidak akan menjadi faktor pendorong yang kuat untuk pelayanan sosial yang lebih baik, tidak mendukung peningkatan dan pembelanjaan publik yang adil di sektor-sektor tersebut yang dibiayai oleh pajak.

11. Di beberapa area, lebih banyak yang harus diketahui; agenda penelitian masa depan harus menjadi prioritas Di beberapa area, khususnya politik ekonomi dari lembaga di Indonesia dan sifat alami dari korupsi; tidak banyak yang diketahui mengenai masalah mendasar di Indonesia dan langkah terbaik yang harus diambil. Tidak banyak yang diketahui mengenai sifat alami dari korupsi di Indonesia dan kaitannya dengan ketimpangan. Persepsi publik memperlihatkan bahwa ini tersebar, dan kasus-kasus besar memberikan contoh yang jelas mengenai peraturan yang bias dan menguntungkan orang dalam atau pihak terkait tanpa ada konsekuensi hukum. Bentuk korupsi cenderung terkait dengan ketimpangan melalui pertumbuhan yang rendah, konsentrasi kekayaan yang tinggi, dan pembuat kebijakan yang memperburuk ketimpangan (sebagai contoh, pasar tenaga kerja yang kaku sehingga menghambat pembentukan lapangan kerja produktif, atau pembatasan

impor yang membuat harga bahan makanan meningkat). Bagaimanapun, analisis politik-ekonomi dan lembaga hukum harus mengidentifikasi penyebab utamanya. Aspek politik, ekonomi, hukum apa di Indonesia yang menyediakan insentif seperti penyewaan lahan, terus berlangsung? Ketika ini diakibatkan oleh kurangnya mekanisme checks and balances dan ketika kurangnya penegakan dari unsur pemeriksaan (checks) (apakah melalui kebijakan investigasi dan penuntutan dari potensi korupsi atau bentuk subversi dari proses hukum melalui penangkapan)?.

12. Di area lainnya, seperti infrastruktur, analisis yang teliti dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan daerah terhadap investasi. Agenda penelitian di masa depan juga harus mempertimbangkan bagaimana infrastruktur dapat ditingkatkan dengan baik pada level daerah. Sebagai contoh, di berbagai lokasi yang berbeda, dibutuhkan jenis infrastruktur yang berbeda untuk membantu meningkatkan akses terhadap pasar dan pelayanan atau untuk menciptakan pekerjaan. Solusi terhadap hambatan akses mungkin berupa jembatan di suatu lokasi, jalan desa di lokasi lain, dan pelabuhan di lokasi lainnya. Analisa infrastruktur yang rinci dapat dikerjakan menggunakan data-data di tingkat daerah, termasuk pemetaan tingkat kemiskinan kabupaten dan desa, serta keadaan fasilitas kabupaten dan desa.

Beberapa Rekomendasi Kebijakan

1. Pengakajian kembali tentang besarnya Upah Minimum Regional yang diberikan, karena besarnya UMR yang diberikan untuk masyarakat golongan menengah kebawah ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
2. Pembangunan infrastruktur diseluruh pelosok wilayah Indonesia, sehingga akan menambah lapangan kerja diberbagai sector dan wilayah. Artinya kaum milenial yang merupakan angkatan kerja terbesar termotivasi untuk membangun desanya masing-masing, sehingga mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.
3. Pengawasan dan pelatihan pengelolaan Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat, sehingga tujuan pemerintah untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan untuk seluruh wilayah akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, Philippe, Eve Caroli, dan Cecilia Garcia-Penalosa (1999) 'Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories.' *Journal of Economic Literature* 37: 1615–1660 <<http://www.jstor.org/stable/2565487>.
- Akita, Takahiro (2003) 'Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-stage Nested Theil Decomposition Method.' *The Annals of Regional Science* 37: 55–<<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs001680200107..>
- Alesina, Alberto dan Dani Rodrik (1994) 'Distribute Politics and Economic Growth.' *The Quarterly Journal of Economics* 109 (2): 465–490 <<http://www.jstor.org/stable/2118470>.
- Alesina, Alberto, Arnaud Devleeschauwer, William Easterly, Sergio Kurlat, dan Romain Wacziarg (2003) 'Fractionalization.' *Journal of Economic Growth* 8: 155–194 <<http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1024471506938>.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN
- Asmanita, 2012. Analisis Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 9, No.1, April 2012 : 67 -75, Universitas PGRI, Palembang.
- Bakri, Syafrizal, Hasdi Aimon. 2015. Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol 4, No 7, 2015, Padang.
- Balisacan, Arsenio M., dan Nobuhiko Fuwa (2003) 'Growth, Inequality and Politics Revisited: A Developing-Country Case.' *Economics Letters* 79: 53–58 <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=353785.
- Baltagi, H.Badi, *Econometric Analysis of Panel Data*, Jhon Wiley and Son.
- Barro, Robert J. (2000) 'Inequality and Growth in a Panel of Countries.' *Journal of Economic Growth* 5 (1): 5–32 <<http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1009850119329>.
- Benabou, Roland (1996) 'Inequality and Growth.' *NBER Macroeconomics Annual*, 11: 11–92 <<http://www.nber.org/chapters/c11027.pdf>.
- Benjamin, Dwayne, Loren Brandt, dan John Giles (2011) 'Did Higher Inequality Impede Growth in Rural China?' *The Economic Journal* 121 (Desember): 1281–1309 <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2011.02452.x/abstract>.
- Berg, Andrew dan Jonathan D. Ostry (2011) 'Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?' *IMF Staff Discussion Note* (April) <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf>.

- Booth, Anne (2000) 'Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment.' *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36 (1): 73–104 <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074910012331337793>> .
BPS.2018. <http://www.bps.go.id>
- Castells-Quintana, David dan Vicente Royuela (2012) 'Unemployment and Long-run Economic Growth: The Role of Income Inequality and Urbanisation.' *Investigaciones Regionales* 24: 153–173
[http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2012/12/David Castells Quintana Vicente Royuela.pdf](http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2012/12/David_Castells_Quintana_Vicente_Royuela.pdf).
- Deininger, Klaus dan Lyn Squire (1998) 'New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth.' *Journal of Development Economics* 57: 259–287 <<http://www.science-direct.com/science/article/pii/S0304387898000996>>.
- Easterly, William (2007) 'Inequality Does Cause Underdevelopment: Insights from a New Instrument.' *Journal of Development Economics* 84: 755–776 <<http://www.biu.ac.il/soc/ec/students/teach/509/data/EasterlyJDE2007.pdf>>.
- Easterly, William dan Ross Levine (1997) 'Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions.' *Quarterly Journal of Economics* 112 (4): 1203–1250 <http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/ Acrobat/stm103%20articles/Easterley_Levine_Ethnic_Divisions.pdf>.
- Fernandez, Raquel, Nezh Guner and John Knowles. "Love And Money: A Theoretical And Empirical Analysis Of Household Sorting And Inequality," *Quarterly Journal of Economics*, 2005, v120(1, Feb), 273–344.
- Galor, Oded (2009) 'Inequality and Economic Development: An Overview.' In *Inequality and Economic Development: The Modern Perspective*. Oded Galor (ed.) Cheltenham: Edward Elgar
<<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.388.5705&rep=rep1&type=pdf>>.
- Galor, Oded dan Daniel Tsiddon (1997) 'The Distribution of Human Capital and Economic Growth.' *Journal of Economic Growth* 2 (1): 93–124 <<http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1009785714248>> .
- Galor, Oded dan Joseph Zeira (1993) 'Income Distribution and Macroeconomics.' *Review of Economic Studies* 60 (1): 35–52 <<http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/GalorZeira.pdf>>.
- Galor, Oded dan Omer Moav, 2004, "From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development," *Review of Economic Studies*, 71(4), 1001-1026. <http://piketty.pse.ens.fr/files/GalorMoavRES2004.pdf> .
- Gujarati, Damodar.2003.Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta. Erlangga.
- Hsiao, C, 1992 " *Panel Analysis for Metric Data, Paper 9213*, Southern California Department of Economics.

- ILO (2011) *World of Work Report 2011: Making Markets Work for Jobs*. Geneva: ILO [dalam jaringan] <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_166021.pdf>
- Jatmiko, 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/31/100200826/seberapa-parah-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-?page=all>
- Kemenkeu.2018.<http://www.kemenkeu.go.id/apbn.2018>
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Analisis Spasial dan Regional. Yogyakarta: AMP YKPN
- Kuznets, Simon (1955) 'Economic Growth and Income Inequality.' *American Economic Review* 45(1):1-28 <<https://www.aeaweb.org/aer/top20/45.1.1-28.pdf>>
- Leibbrandt, Murray, Ingrid Woolard, Hayley McEwen, dan Charlotte Koep (n.d.) *Employment and Inequality Outcomes in South Africa*. Cape Town, South Africa: Southern Africa Labor and Development Research Unit (SALDRU) and School of Economics University of Cape Town <<http://www.oecd.org/employment/emp/45282868.pdf>>
- Li, Hongyi, dan Zou, Heng-fu (1998) 'Income Inequality Is Not Harmful for Growth: Theory and Evidence.' *Review of Development Economics* 2 (3): 318-334 [dalam jaringan] <https://drive.google.com/file/d/0B1WYq1C_V1bdNmQ4YjEzOGEtMjQ3OC00NzFmLWFINDEtYjkwYTEyMzg2Mjg0/edit?hl=zh_CN&pli=1>
- Luebker, Malte (2012) 'Income Inequality, Redistribution and Poverty: Contrasting Rational Choice and Behavioural Perspectives.' *ILO Research Paper No.1*. Geneva: International Labour Organization [dalam jaringan] <http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2012/en_GB/wp2012-044/>
- Maipita Indra, Hermawan Wawan, Fitrawaty, Eko Wahyu Nugrahadi, Hibah Kompetitif Penelitian Strategi Nasional: Pengembangan Model Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Tangga. Desember 2013. Universitas Negeri Medan,
- Maipita Indra, Hermawan Wawan, Fitrawaty. 2015.Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidies Diversions to Non Food Crops. Buletin Ekonomi Moneter Perbankan, April. 2012
- Maipita Indra. 2013. Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mancini, Luca (2005) 'Horizontal Inequality and Communal Violence: Evidence from Indonesian Districts.' *Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE) Working Paper No. 22* [dalam jaringan] <<http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper22.pdf>>

- Miranti, Riyana, Yogi Vidyattama, Erick Hansnata, Rebecca Cassells, dan Alan Duncan (2013) 'Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia.' *OECD Social, Employment and Migration Working Paper No.148*. Paris: OECD.
- Montalvo, Jose G., dan Marta Reynal-Querol (2005) 'Ethnic Diversity and Economic Development.' *Journal of Development Economics* 76: 293–323 [dalam jaringan] <http://www.econ.upf.edu/~reynal/jde_marta_jose.pdf>
- OECD (2011) *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*. Washington D.C.: OECD Publishing.
- Ostry, Jonathan D., Andrew Berg, dan Charalambos G. Tsangarides (2014) 'Redistribution, Inequality, and Growth.' *IMF Staff Discussion Note*, February <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf>>.
- Perotti, Roberto (1996) 'Growth, Income Distribution and Democracy: What the Data Say.' *Journal of Economic Growth* 1 (2): 149–87 <<https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A100226>>.
- Perrson, Torsten dan Guido Tabellini (1994) 'Is Inequality Harmful for Growth.' *The American Economic Review* 84 (3): 600–621 <http://lib.cufe.edu.cn/upload_files/other/4_20140530024131_%5B54%5DPerrson,%20T.,%20and%20G.%20Tabellini.%201994.%20Is%20Inequality%20Harmful%20for%20Growth%20American%20Economic%20Review%2084,%20600-21.pdf>
- Qin, Duo, Marie Anne Cagas, Geoffrey Ducanes, Xinhua He, Rui Liu, dan Shiguo Liu (2009) 'Effects of Income Inequality on China's Economic Growth.' *Journal of Policy Modelling* 31: 69–86 <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893808000719>>.
- Rajan, Raghuram G. dan Luigi Zingales (2006) 'The Persistence of Underdevelopment: Institutions, Human Capital, or Constituencies?' *NBER Working Paper No. 12093* <<http://dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/RajanZingales2006.pdf>>
- Ranis, G and F.Stewart .2002, Economic Growth and Human Development in Latin America. *Cepal Review*, (78): 7-23
- Ravallion, Martin (1998) 'Does Aggregation Hide the Harmful Effects of Inequality on Growth?' *Economic Letters* 61: 73–77 <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176598001396>>.
- Saint-Paul, Gilles dan Thierry Verdier (1996) 'Inequality, Redistribution and Growth: A Challenge to the Conventional Political Economy Approach.' *European Economic Review* 40 (3–5): 719–728 <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014292195000836>>.
- Stewart, Frances, Graham Brown, dan Luca Mancini (2005) 'Why Horizontal Inequalities Matter: Some Implications for Measurement.' *Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE) Working Paper No. 19* <<http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper19.pdf>>.

(Sjafrizal, 2008)

- . (1993) 'Education, Democracy, and Growth.' *Journal of Development Economics* 42 (2): 399–407 <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030438789390027K>> .
- . (2013b) 'Miracle That Never Was: Disaggregated Level of Inequality in Indonesia.' *International Journal of Development Issues* 12 (1): 22–35 <<http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14468951311322091>>
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan (2013a) *Earnings, Productivity and Inequality in Indonesia*. Report for the ILO Jakarta. Mimeo.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2007. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Terjemahan). Jakarta:Erlangga.
- United nation Development Programme (UNDP).2013. *Human Development Report 2012/2013*. New York City: United Nations Development Programme
- United Nations (UN) (2013) *Inequality Matters: Report of the World Social Situation 2013*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) <<http://www.un.org/esa/socdev/documents/reports/InequalityMatters.pdf>> .
- Venieris, Y. P., dan D. K. Gupta (1986) 'Income-Distribution and Sociopolitical Instability as Determinants of Savings—a Cross-Sectional Model.' *Journal of Political Economy* 94 (4): 873–883 [dalam jaringan] <<http://www.jstor.org/stable/1833207>> .
- Widarjono Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII
- Yusuf, Arief Anshory, Andy Sumner, dan Irlan Adiyatma Rum (2013) 'The Long-Run Evolution of Inequality In Indonesia, 1990–2012: New Estimates and Four Hypotheses On Drivers.' *Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) No. 201314*. Bandung: Department of Economics, Padjadjaran University <<http://www.ceds.fe.unpad.ac.id/publications/wopedes/406-the-long-run-evolution-of-inequality-in-indonesia-19902012-new-estimates-and-four-hypotheses-on-drivers.html>>.

